

**PERUBAHAN STRATEGIS  
POLITIK LUAR NEGERI JEPANG DI ASEAN  
PADA AKHIR 1970-an : KASUS DOKTRIN FUKUDA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam  
Kajian Wilayah Jepang**

**AJI ANASTASHIA ASTRIANA HAKIM**

**0606024112**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN WILAYAH JEPANG  
KEKHUSUSAN : DIPLOMASI JEPANG  
DEPOK  
JULI 2009**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Aji Anastashia Astriana Hakim**

**NPM : 0606024112**

**Tanda Tangan :** 

**Tanggal : 15 Juli 2008**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Aji Anastashia Astriana Hakim  
NPM : 0606024112  
Program Studi : Kajian Wilayah Jepang  
Judul Tesis : Perubahan Strategis Politik Luar Negeri Jepang di ASEAN pada akhir 1970-an : kasus Doktrin Fukuda

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Kajian Wilayah Jepang, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Syamsul Hadi (.....)  
Pembimbing : Dr. Sudung Manurung (.....),  
Penguji : Prof. Dr. Nurhadi Magetsari (.....)  
Penguji : Dr. Tirta Mursitama (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 15 Juli 2009



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur yang sebesar-besarnya, penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, yang dengan Rahmat dan HidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Penyusunan Tesis ini tentunya tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya yang tak terhingga melalui berbagai hal dalam proses kehidupan yang dijalani oleh penulis.
2. Bapak Dr. Syamsul Hadi, selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis untuk menyusun tesis.
3. Bapak Dr. Sudung Manurung, selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar, memberikan nasihat dan terus mendukung dalam proses penyelesaian tesis penulis.
4. Ketua Program Pascasarjana Kajian Wilayah Jepang beserta staf yang telah memfasilitasi sidang tesis sehingga dapat berjalan dengan lancar.
5. Penguji Ahli Prof. Dr. Nurhadi Magetsari dan Dr. Tirta Murtisama yang telah berkenan menguji dan memberikan masukan pada tesis ini.
6. Seluruh staf Pengajar Program Kajian Wilayah Jepang yang telah memberikan kemudahan dan menambah pengetahuan penulis selama masa kuliah.
7. Kedua Orangtua penulis yang doanya selalu menyertai penulis kapanpun dan dimanapun serta nasihatnya untuk selalu ingat, berdoa dan bersujud kepadaNya.
8. Kak Dharta & kak Icha yang selalu mendukung, kak Fana atas doa-doanya dan kak Mara atas pinjaman laptop, printer dan bantuan mempersiapkan presentasi yang nyaris sempurna.
9. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S2 Kajian Wilayah Jepang angkatan 2006: Sissy, Vivi, Mba' Mugi, Mba' Nana, Mba' Santi, Pepi, Andes dan

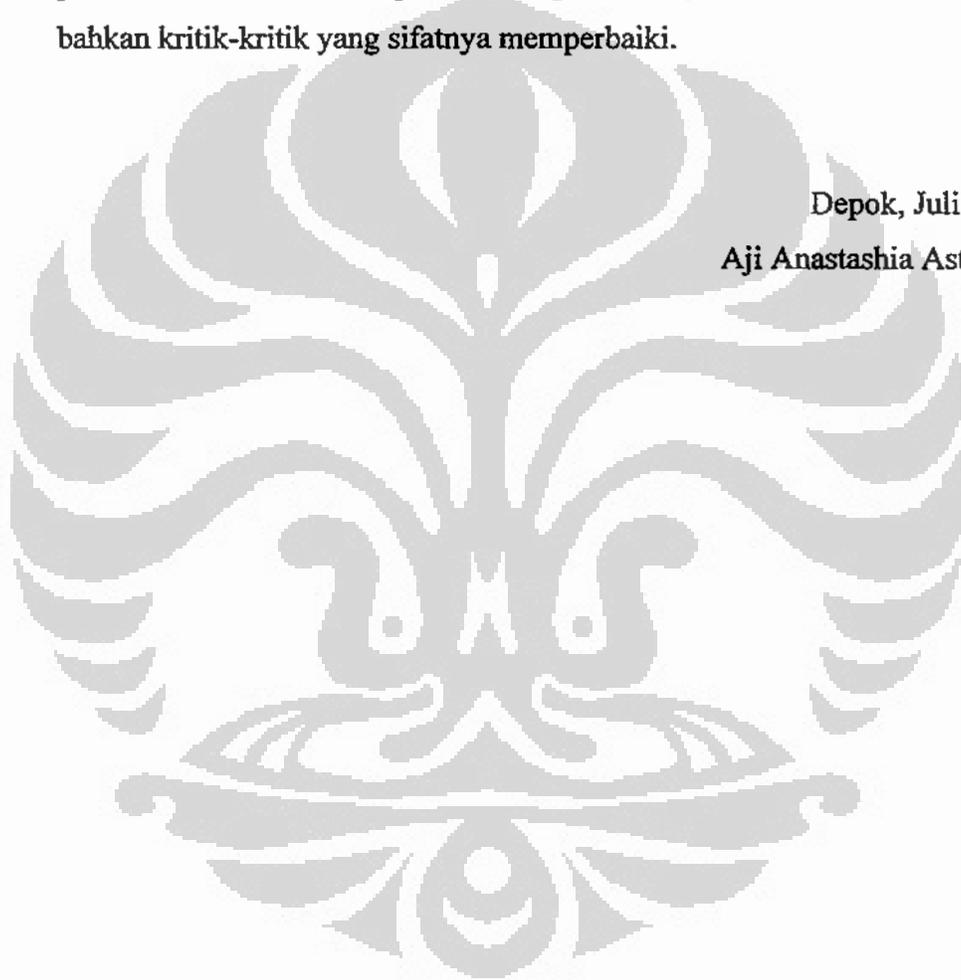
Sita, yang sudah banyak membantu dan selalu memberi semangat kepada penulis.

10. Nama-nama lain yang belum tersebut tetapi turut membantu dan memberikan dukungan doa serta semangat kepada penulis, terima kasih...

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangannya dikarenakan terbatasnya pengetahuan maupun pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima saran-saran dan bahkan kritik-kritik yang sifatnya memperbaiki.

Depok, Juli 2009

Aji Anastashia Astriana Hakim



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aji Anastashia Astriana Hakim  
NPM : 0606024112  
Program Studi : Kajian Wilayah Jepang  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perubahan Strategis Politik Luar Negeri Jepang di ASEAN pada akhir 1970-an :  
kasus Doktrin Fukuda

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 15 Juli 2009.

Yang menyatakan



(Aji Anastashia Astriana Hakim)

## ABSTRAK

Nama :Aji Anastashia Astriana Hakim  
Program Studi :Kajian Wilayah Jepang  
Judul : Perubahan Strategis Politik Luar Negeri Jepang di ASEAN pada akhir 1970-an : kasus Doktrin Fukuda

Tesis ini menjelaskan tentang Perubahan Strategis Politik Luar Negeri Jepang di ASEAN pada akhir 1970-an : kasus Doktrin Fukuda. Di dalamnya berisi mengenai upaya Jepang melalui Perdana Menteri Fukuda Takeo untuk memperbaiki hubungan Jepang dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Fukuda Takeo berpedoman pada Diplomasi dari Hati ke Hati yang diwujudkan dalam 3 butir penting Doktrin Fukuda. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melihat 2 sisi yaitu Historis dan Behavioralis. Sedangkan Teori yang digunakan adalah *Soft Power* dan mengaplikasikannya pada Doktrin Fukuda. Pada hasil penelitian didapatkan kesesuaian antara pelaksanaan Doktrin Fukuda dan *Soft Power*.

Kata kunci:

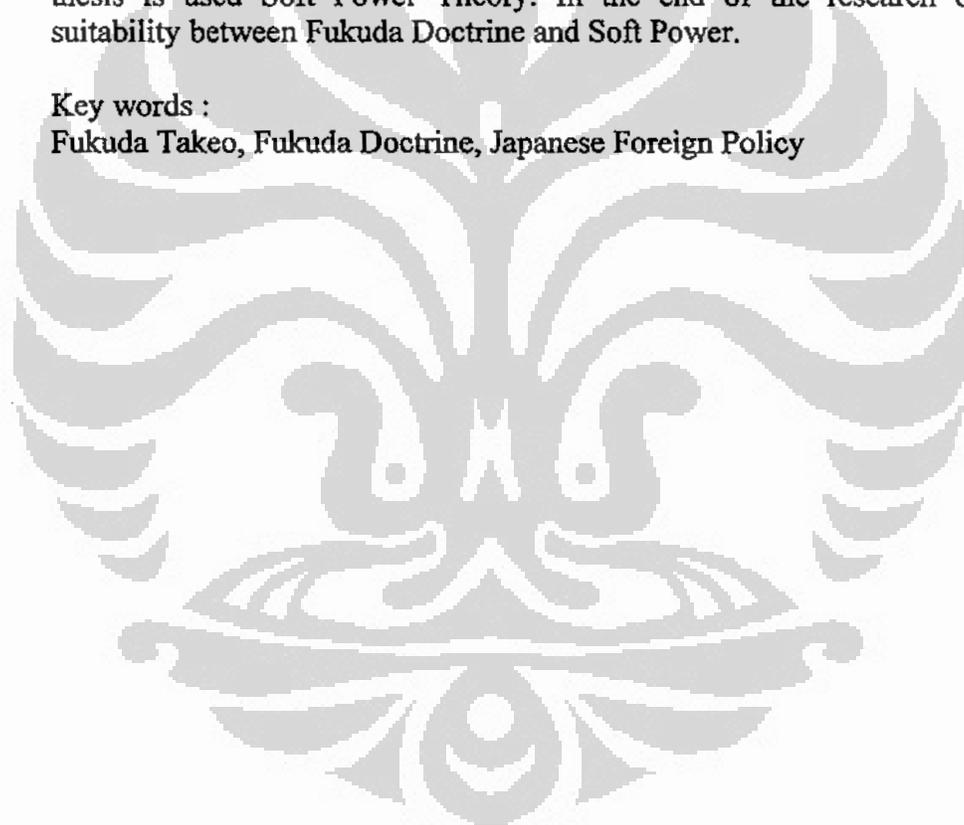
Fukuda Takeo, Doktrin Fukuda, Politik Luar Negeri Jepang

## ABSTRACT

Name : Aji Anastashia Astriana Hakim  
Study Program : Japanese Area Studies  
Title : The Changing Strategy Japan Foreign Politic in ASEAN  
in the end of 1970's : Fukuda's Doctrine Case

This thesis describes the changing strategy Japan foreign politic in ASEAN in the end of 1970's : Fukuda's doctrine case. It's contain the efforts of Japan's government to improve Japan's relations with countries in the ASEAN region through Prime Minister Fukuda Takeo. Fukuda Takeo Diplomacy is based on Heart to Heart and realized on 3 important point namely Fukuda's Doctrine. This research is qualitative research with the view of History and Behavioralis. This thesis is used Soft Power Theory. In the end of the research obtained the suitability between Fukuda Doctrine and Soft Power.

Key words :  
Fukuda Takeo, Fukuda Doctrine, Japanese Foreign Policy



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Permasalahan.....	6
1.3. Batasan Masalah.....	6
1.4. Kerangka Teori.....	6
1.5. Asumsi Penelitian.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Tujuan Penelitian.....	12
1.8. Signifikansi Penelitian.....	13
1.9. Tinjauan Pustaka.....	13
1.10. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II ASEAN DAN KEPENTINGAN JEPANG.....</b>	<b>15</b>
2.1. Sejarah ASEAN.....	15
2.2. Kepentingan Jepang di ASEAN.....	25
<b>BAB III POLITIK LUAR NEGERI JEPANG SETELAH PERANG DUNIA II SAMPAI DENGAN 1970-an.....</b>	<b>28</b>
3.1. Politik Luar Negeri Jepang Setelah Perang Dunia II.....	30
3.2. Kebijakan Perdana Menteri Jepang Setelah Perang Dunia II.....	36
3.2.1. Perdana Menteri yang Memerintah di Jepang Sejak Berakhirnya Perang Dunia II.....	36
3.2.2. Kebijakan Perdana Menteri di Jepang.....	37

<b>BAB IV PERUBAHAN KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI</b>	
<b>JEPANG DI ASEAN.....</b>	<b>52</b>
4.1. Perdana Menteri yang Berperan Penting.....	52
4.2. Fukuda Takeo dan Kebijakan Luar Negeri Setelah 1970-an.....	57
4.2.1. Fukuda Takeo, Riwayat dan Karier.....	57
4.2.2. Kebijakan Fukuda Takeo.....	59
4.2.3. Doktrin Fukuda.....	59
4.3. Perubahan Strategis Kebijakan Luar Negeri.....	62
4.3.1. Kondisi di Negara-negara ASEAN.....	64
4.3.2. Perubahan Strategis yang Dilakukan.....	65
4.3.3. Pendekatan Teori <i>Soft Power</i> pada Doktrin Fukuda.....	72
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Berakhirnya Perang Dunia (PD) II telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam politik internasional. Perubahan politik internasional itu ditandai dengan munculnya Amerika Serikat (AS) bersama Uni Soviet, Inggris, Perancis dan Cina sebagai negara-negara yang berstatus *super power* yang nantinya berperan dalam proses globalisasi. Selain itu, setelah PD II juga banyak lahir negara-negara yang baru merdeka di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Perubahan tidak hanya dirasakan oleh negara-negara baru tersebut, tetapi juga bagi negara-negara yang kalah pada PD II yaitu Jerman, Jepang dan Italia.

Dampak dari kekalahan pada PD II sangat berpengaruh terhadap Jepang. Setelah kekalahannya pada PD II, Jepang tidak lagi memiliki kekuatan di bidang militer. Begitu juga dengan dunia politiknya. Dunia politik Jepang lebih banyak dipengaruhi oleh AS. Kebijakannya masih terkait dengan strategi dan kepentingan AS di kawasan Asia Pasifik. Dalam berhubungan dengan negara-negara Asia Timur Laut, para tetangganya seperti Cina, Korea Utara dan Korea Selatan, Jepang sangat berhati-hati melakukan pendekatan dikarenakan hubungan masa lalu yang tidak baik akibat perang. Begitu juga dengan hubungannya terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Walaupun menjalin hubungan dengan negara-negara Asia Timur Laut, tetapi secara politis Jepang masih merasa khawatir dengan hubungan tersebut.

Keadaan politik Jepang yang banyak dipengaruhi oleh AS diawali ketika pesawat-pesawat Jepang menyerang pertahanan AS di Pearl Harbor. Kejadian ini kemudian berkembang menjadi sebuah ancaman bagi politik luar negeri AS yang awalnya isolasionis berubah cenderung agresif.<sup>1</sup> PD II mengubah peta politik dunia. Negara-negara sekutu dibawah kepemimpinan AS membelah Jerman Barat

---

<sup>1</sup> Bambang Cipto, *Politik dan Pemerintahan Amerika*, Penerbit LIngkaran, Yogyakarta, 2003, hal. 197.

yang berada dibawah pengaruh AS dan Jerman Timur yang tunduk dibawah pengaruh Uni Soviet. Sesudah PD II usai, hubungan AS dan Uni Soviet pecah karena perbedaan ideologi dan kepentingan kedua negara khususnya terhadap negara-negara Eropa memicu munculnya era Perang Dingin. Soviet yang sangat agresif menginvasi negara-negara Eropa Timur mendorong AS kembali terjun ke dalam kancah konflik dunia.<sup>2</sup>

Sukses AS dalam menahan gerakan Nazi Jerman terlibat kembali dengan munculnya krisis di Yunani dan Turki. Upaya penyelamatan kedua negara tersebut dari jatuh ke tangan Soviet dilandasi dengan apa yang disebut *Truman Doctrine*. Disamping membantu Yunani dan Turki, Amerika juga mengembangkan *Marshall Plan* yaitu kebijakan bantuan ekonomi untuk memulihkan kembali negara-negara Eropa yang runtuh akibat PD II. Politik pembendungan pengaruh komunis ini juga dikembangkan terhadap Cina yang beraliran komunis dan Jepang yang kalah perang. Jepang dimanfaatkan sebagai basis pertahanan di kawasan Timur Jauh dan mengubah Jepang dari sistem kerajaan menjadi sistem demokrasi. Sementara itu, Jepang menjadikan AS sebagai pelindung keamanan dan AS menjadikan Jepang sebagai tempat untuk mengawasi perkembangan komunis dari dekat yakni di Cina dan Korea Utara.<sup>3</sup>

Karena itulah ketika Jepang tidak dapat lagi berbuat banyak di bidang militer dan politiknya, negara itu mulai mengandalkan ekonominya. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh AS yang melakukan perluasan liberalisasi ekonomi. Jepang mulai mengadopsi dan menerapkan liberalisasi dalam ekonominya. Jepang mengawali langkah untuk memperbaiki dan membangun kembali keadaan ekonominya dengan melaksanakan kebijakan politik luar negeri bekerjasama dengan AS. Tepatnya pada tahun 1951 ketika Perdana Menteri (PM) Yoshida Shigeru menandatangani perjanjian dengan AS yang dinamakan *Yoshida Doctrine*. Bahkan Yoshida mengeluarkan pernyataan, bahwa "*Beraliansi dengan AS merupakan kunci dasar bagi Jepang melakukan rekonstruksi keadaan ekonomi*

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 197-198.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 198-199.

dan merupakan tonggak utama dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri.”<sup>4</sup>

Ekonomi Jepang pun mengalami kemajuan yang signifikan. Jepang bahkan dijuluki sebagai ‘Keajaiban Asia’ karena prestasi ekonominya, yang diiringi dengan sikap menjauhi konflik-konflik politik keamanan global.<sup>5</sup> Kemudian Jepang juga mulai melaksanakan Diplomasi Ekonomi ke kawasan Asia selain Asia Timur, yaitu Asia Tenggara. Jepang memperkuat posisinya di bidang ekonomi dan memperkuat hubungannya dengan Negara-negara Asia Tenggara yang tergabung di dalam *Association South East Asia Nations* (ASEAN) melalui *Official Development Assistance* (ODA).

Bahkan dalam perkembangannya, Indonesia menjadi salah satu negara ASEAN penerima ODA terbesar sebagai kompensasi proyek perbaikan dan ganti rugi perang Jepang yang dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

---

<sup>4</sup> Abdul Irsan, *Budaya & Perilaku Politik Jepang di Asia*, Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2007, hal. 71.

<sup>5</sup> A. Irawan J.H, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hal. 114.

Tabel 1. ODA Jepang bagi Indonesia 1966 – 1979

(dalam Milyar Yen)

Tahun	Hibah & Kerjasama Teknis		Pinjaman		Total /Tahun
	Jumlah	% Total	Jumlah	% Total	
1966	n/a	n/a	10,80	n/a	n/a
1967	n/a	n/a	34,38	n/a	n/a
1968	n/a	n/a	29,47	n/a	n/a
1969	4,04	12,11	29,32	87,89	33,36
1970	4,27	10,60	36,00	89,40	40,27
1971	4,44	5,70	73,33	94,30	77,76
1972	4,00	5,89	63,92	94,11	67,92
1973	4,42	3,000	142,78	97,00	147,20
1974	1,73	2,80	60,00	97,20	61,73
1975	3,11	4,80	61,62	95,20	64,73
1976	5,00	6,93	67,25	93,07	72,25
1977	7,56	11,98	55,50	88,02	63,06
1978	8,81	8,91	90,05	91,09	98,86
1979	10,87	11,00	88,00	89,00	98,87

Sumber : JICA<sup>6</sup>

Diplomasi Ekonomi yang dilakukan di kawasan Asia Tenggara bukan tanpa hambatan. Diawali pada tahun 1970-an ketika tindakan Presiden Nixon dari AS yang secara tiba-tiba melakukan politik *rapprochement* terhadap Cina yang didahului dengan *ping-pong diplomacy*. Peristiwa ini turut mempengaruhi situasi politik dan hubungan internasional di Asia. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran politik dalam hubungan antar bangsa yang cenderung ke arah semakin meredanya suasana Perang Dingin.<sup>7</sup>

Upaya Jepang yang hanya berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi dan perdagangan internasional mengakibatkan Jepang dijuluki sebagai *Raksasa*

<sup>6</sup> Syamsul Hadi, *Strategi Pembangunan Mahathir dan Soeharto Politik Industrialisasi dan Modal Jepang di Malaysia dan Indonesia*, Pelangi Cendekia dari Yayasan Pelangi dibantu Japan Foundation, Jakarta, 2005, hal. 182.

<sup>7</sup> Abdul Irsan, *Budaya & Perilaku Politik Jepang di Asia*, Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2007, hal. 76.

*Ekonomi yang tidak memiliki kekuatan militer yang memadai.* Negara-negara Barat menganggap Jepang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri untuk memperkaya diri tanpa mau peduli terhadap situasi politik dunia.<sup>8</sup> Oleh sebab itu, di beberapa negara Asia Tenggara muncul anggapan bahwa Jepang telah melakukan *economy colonized* atau *economic animal*. *Economic animal* adalah sebuah pemahaman yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara bahwa Jepang telah melakukan penguasaan ekonomi di negara mereka dan juga di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan anggapan tersebut, akhirnya banyak terjadi gerakan anti Jepang di kawasan Asia Tenggara. Akibatnya muncul sebuah peristiwa yang dinamakan dengan Tragedi Malari di Indonesia, Tragedi Malari terjadi pada 15 Januari 1974, diawali dengan adanya kunjungan PM Jepang Tanaka Kakuei ke Jakarta (14 – 17 Januari 1974).<sup>9</sup> Tidak hanya Malari saja, tetapi pada saat yang bersamaan juga terjadi berbagai gerakan anti Jepang di kawasan Asia Tenggara lainnya. Gerakan demonstrasi dan kampanye anti Jepang terjadi di Thailand.

Untuk memperbaiki keadaan tersebut, Jepang mulai melakukan berbagai hal yang akan dapat memulihkan hubungan antara Jepang dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jepang melakukan perubahan strategis politik luar negeri di akhir 1970-an. Diawali ketika pergantian PM Jepang Miki Takeo dengan Fukuda Takeo. Fukuda melakukan persiapan matang guna menjalin hubungan baiknya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. PM Fukuda mengeluarkan sebuah Doktrin yang dinamakan Doktrin Fukuda pada Agustus 1977.<sup>10</sup>

Dengan dikeluarkannya Doktrin tersebut, Fukuda memperkenalkan sebuah bentuk Diplomasi baru yaitu *Heart to Heart Diplomacy* (Diplomasi dari hati ke hati). Esensi dari Doktrin Fukuda tersebut adalah :

---

<sup>8</sup> Ibid, hal. 76.

<sup>9</sup> Adam, Asvi Warman, *Malari 1974 dan Sisi Gelap Sejarah*, 16 Januari 2003.  
<<http://www.kompas.com>>

<sup>10</sup> Widyahartono, Bob, *Telaah – Sejarah Pendekatan “Kokusaika” Sejak Doktrin Fukuda 1977*, ANTARA NEWS, 16 September 2007.  
<<http://www.antara.com>>

1. Jepang tidak akan pernah menjadi negara adidaya militer.
2. Jepang akan menjalin hubungan dengan rasa saling pengertian dan rasa saling percaya terhadap negara-negara Asia Tenggara.
3. Jepang akan bekerjasama secara positif dengan seluruh negara anggota ASEAN sebagai mitra sejajar.<sup>11</sup>

Sejak adanya Doktrin Fukuda, saat itulah dimulai sebuah pendekatan baru terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pendekatan tersebut lebih mengutamakan kedamaian hubungan baik bagi kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan karena kedua belah pihak saling memiliki kepentingan satu sama lain, dalam kasus ini adalah Jepang. Salah satu langkah yang dilakukan Jepang adalah dengan melengkapi bentuk Diplomasinya yang selama ini hanya bertumpu di bidang Ekonomi dengan Kebudayaan yaitu yang dinamakan dengan Diplomasi Kebudayaan. Diharapkan dengan menggunakan kedua pendekatan Ekonomi dan Kebudayaan ini nantinya Jepang dapat memperoleh kembali kepercayaan dari ASEAN sehingga semakin meningkatkan hubungan dan posisinya terhadap ASEAN di masa yang akan datang.

### **1.2. Permasalahan**

Permasalahan yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perubahan strategis politik luar negeri Jepang di ASEAN pada akhir 1970-an ?

### **1.3. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah politik luar negeri dan diplomasi Jepang setelah PD II hingga terjadinya perubahan strategis politik luar negeri Jepang di kawasan Asia Tenggara pada akhir 1970-an. Sedangkan kasus yang akan diteliti adalah Doktrin Fukuda yang dikeluarkan oleh PM Fukuda Takeo.

### **1.4. Kerangka Teori**

Pada penulisan ini, penulis menggunakan 2 konsep. Konsep pertama adalah konsep mengenai Kebijakan Luar Negeri. Setiap negara memiliki kepentingan,

---

<sup>11</sup> Sahrasad, Herdi, *PM Fukuda, Asia Tenggara dan Doktrin Fukuda*, 28 September 2007.  
<<http://www.bisnis.com>>

baik itu nasional maupun internasional. Agar tercapainya suatu kepentingan, dibuatlah sebuah kebijakan negara yaitu Kebijakan Domestik dan Kebijakan Luar Negeri. Kebijakan Domestik dibuat untuk mencapai kepentingan nasional. Sedangkan Kebijakan Luar Negeri dibuat untuk mencapai kepentingan sebuah negara di dunia internasional. Kebijakan Luar Negeri adalah sejumlah hubungan luar yang dilakukan secara resmi oleh aktor independen (biasanya negara) di dalam hubungan internasional.<sup>12</sup> Kebijakan Luar Negeri dapat berupa Kebijakan yang terkait dengan Ekonomi, Politik, Pertahanan dan bidang-bidang lainnya. Untuk menyampaikan Kebijakan Luar Negerinya, negara melakukan suatu proses yang dinamakan dengan Diplomasi.

Diplomasi merupakan konsep kedua yang akan digunakan dalam penulisan ini. Pengertian dari Diplomasi yang sangat erat dihubungkan dalam hubungan antarnegara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya. (S.L. Roy, 1991:5). Diplomasi juga dapat dilakukan suatu negara untuk membantu negara lain. Dalam suatu negara yang melakukan diplomasi adalah para Diplomat. Diplomat tugasnya untuk berdiplomasi mewakili negaranya dengan negara lain. Diplomasi merupakan salah satu cara efektif yang dilakukan negara-negara untuk memulai dan meningkatkan hubungan dengan negara lain. Diplomasi akan lebih mudah dilakukan apabila suatu negara memiliki diplomat yang handal. Hal yang juga penting jika suatu negara ingin menjalin hubungan dengan negara lain adalah memiliki citra yang baik di dunia internasional.

Sedangkan kerangka Teori yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah *Soft Power Theory*. Sebelum saya membicarakan lebih lanjut tentang *Soft Power*, saya akan bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan *Power* oleh Joseph Nye dalam bukunya *Soft Power, The Means to Success in World Politics*. *Power is the ability to influence the behavior of others to get the outcomes one wants.*

---

<sup>12</sup> Christopher, Hill, *The Changing Politic of Foreign Policy*, Palgrave Macmillan, New York, 2003, hal.3.

Jadi *Power* adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, kelompok atau negara untuk mempengaruhi perilaku pihak lainnya agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi perilaku pihak lainnya adalah dengan cara tidak memaksa mereka dengan ancaman-ancaman, memberikan bantuan berupa pinjaman dan menarik perhatian dan mengajak bekerjasama agar menginginkan hal yang sama dengan yang kita inginkan.

Berikut adalah tipe-tipe *Power*, yaitu :

**Tabel 2. Tipe-tipe Power** <sup>13</sup>

	Behaviors	Primary Currencies	Government Policies
Military Power	Coercion Deterrence Protection	Threats Force	Coercive Diplomacy War Alliance
Economic Power	Inducement Coercion	Payments Sanctions	Aid Bribes Sanctions
Soft Power	Attraction Agenda Setting	Values Culture Policies Institutions	Public Diplomacy Bilateral and Multilateral Diplomacy

Berdasarkan tipe-tipe di atas ada 3 tipe *Power* yaitu *Military Power*, *Economic Power* dan *Soft Power*. Sedangkan yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah *Soft Power*. Berikut akan dijelaskan mengenai *Soft Power*.

- **Soft Power**

*Soft Power* dikemukakan oleh Joseph Nye, seorang Dekan di *John F. Kennedy School of Government, Harvard University*. Menurut Joseph Nye yang

<sup>13</sup> Nye Jr, Joseph S, *Soft Power : The Means to Success in World Politics*, Public Affairs, New York, 2004, hal.31

dimaksud dengan *Soft Power* adalah *The Power of a nation to attract and persuade through culture, political ideals and policies.*<sup>14</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas *Soft Power* adalah kekuatan yang dimiliki oleh sebuah negara untuk menarik perhatian dan meyakinkan negara lainnya melalui berbagai bidang yaitu Budaya, Ideologi Politik dan Kebijakan. Walaupun terdapat kata *Power* yang selama ini identik dengan kekerasan, paksaan, ancaman atau peperangan, tetapi *Soft Power* menggunakan cara-cara halus seperti Kerjasama. Sedangkan *Power* yang menggunakan cara-cara paksaan, ancaman atau peperangan adalah *Hard Power*.

Untuk lebih jelas dalam membedakan antara *Soft Power* dan *Hard Power* berikut adalah perbedaan antara *Soft Power* dan *Hard Power* :

**Tabel 3. Perbedaan Soft Power dan Hard Power :<sup>15</sup>**

	Hard		Soft	
Spectrum of Behaviors	Coercion Command	Inducement	Agenda setting	Attraction Co-opt
Most Likely Resources	Force Sanctions	Payments Bribes	Institutions	Values Culture Policies

*Soft Power* diterapkan oleh suatu negara melalui Diplomasi dengan cara-cara damai dan tidak menggunakan kekuatan militer dan kekerasan. Berbeda dengan *Hard Power* yang berdiplomasi dengan menggunakan kekuatan militer yang membuat negara lain setuju dan mengikuti keinginannya.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Rutledge, Ann, *Soft Power : The Means to Success in World Politics*, 22 April 2004.

<[http://www.japansociety.org/corporate/event\\_corp\\_note.cfm](http://www.japansociety.org/corporate/event_corp_note.cfm)>

<sup>15</sup> Nye Jr, Joseph S, *Soft Power : The Means to Success in World Politics*, Public Affairs, New York, 2004, hal. 8

<sup>16</sup> Nye, Jr, S, Joseph, *Propaganda Isn't The Way : Soft Power*, *The International Herald Tribune*, 10 Januari 2003. <[http://www.ksg.harvard.edu/news/opeds/2003/nye\\_soft\\_power\\_iht\\_011003.htm](http://www.ksg.harvard.edu/news/opeds/2003/nye_soft_power_iht_011003.htm)>

- **Sumber dari Soft Power**

Adapun sumber-sumber dari *Soft Power* yang dikemukakan oleh Joseph Nye adalah Budaya, Nilai-nilai Politik dan Kebijakan Luar Negeri.<sup>17</sup>

#### A. Budaya

Budaya merupakan sekumpulan nilai-nilai dan praktek yang membentuk sebuah masyarakat sosial. Budaya seringkali dibedakan menjadi 2, yaitu budaya tingkat tinggi seperti sastra, seni dan pendidikan yang biasanya dipahami dan menarik bagi kalangan atas. Budaya yang kedua adalah budaya populer yang lebih diperuntukkan bagi masyarakat luas, biasanya berupa hiburan rakyat.

Walaupun lebih memasyarakat dan dapat diterima berbagai kalangan tetapi budaya populer bukanlah termasuk *Soft Power*. Tetapi antara *Soft Power* dan budaya populer bukannya tidak terkait. Budaya populer menciptakan sesuatu yang menjadi sumber dari *Soft Power*. Contohnya kartun Doraemon (ドラエモン).

Doraemon sangat terkenal di seluruh dunia. Tetapi diterimanya Doraemon di negara lain tidak serta merta membuat Jepang dengan mudahnya mendapatkan hasil yang diinginkannya dari negara tersebut. Dengan menyaksikan kartun Doraemon yang diputar di Televisi akan membuat orang mengetahui bagaimana Jepang melalui tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Bagaimana karakter orang Jepang, bagaimana kehidupan sehari-hari orang Jepang baik itu di sekolah, lingkungan tempat tinggal serta kantor. Tidak hanya itu, orang juga dapat mengetahui bagaimana kebijakan dalam negeri Jepang dan aturan-aturan sosial yang berlaku di Jepang.

Dengan begitu orang yang berada di negara lain dapat mengetahui budaya Jepang dan secara tidak langsung Jepang telah berhasil melakukan *Soft Power* yang bersumber dari budaya.

#### B. Nilai-nilai Politik

Nilai-nilai Politik yang ada di dalam negeri dan luar negeri juga merupakan sumber dari *Soft Power*. Ideologi negara yang digunakan dan pelaksanaan di dalam negeri serta kepentingan suatu negara menjadi faktor penting penunjang

---

<sup>17</sup> Nye Jr, Joseph S, *Soft Power : The Means to Success in World Politics*, Public Affairs, New York, 2004, hal. 13

suksesnya *Soft Power*. Contohnya Rusia yang berideologi paham Komunis akan lebih mudah menjalin kerjasama dengan China, yang memiliki ideologi yang sama. Berbeda dengan China dan AS, AS yang menerapkan Demokrasi Liberal di negaranya tentunya tidak akan semudah Rusia untuk bekerjasama dengan China.

Begitu juga apabila menyangkut kepentingan suatu negara. Negara-negara yang berkepentingan sama tentu akan mudah untuk bekerjasama mencapai kepentingan tersebut walaupun berbeda ideologi. Contohnya Korea Utara dan Iran. Walaupun Iran merupakan negara Sekuler tetapi ketika menyangkut urusan kepentingan Nuklir, Iran akan lebih bersahabat dengan Korea Utara yang juga mempunyai kepentingan yang sama.

### C. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan Luar Negeri suatu negara mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap *Soft Power*. Suatu negara yang memiliki Kebijakan Luar Negeri yang populer akan sangat mudah mendapatkan hasil yang diinginkannya, tetapi apabila negara itu salah melangkah atau menciptakan Kebijakan Luar Negeri baru yang tidak populer maka tingkat kepercayaan terhadap negara tersebut akan berkurang dengan sendirinya. Contohnya Kebijakan Luar Negeri AS yang sangat populer dengan mengagung-agungkan Perdamaian Dunia dan melindungi Hak Asasi Manusia. Tetapi kepercayaan terhadap AS semakin berkurang ketika pada tahun 2003 AS menginvasi Irak. AS menuduh Irak memiliki senjata pemusnah massal yang hingga sekarang belum pernah terbukti kebenarannya. Kebijakan Luar Negeri yang tidak populer itu akhirnya mengakibatkan Presiden AS pada saat itu George Bush dan partainya mengalami kekalahan di Pemilihan Umum 2008 di AS. Bukan hanya di dalam negeri, AS juga mengalami defisit anggaran pasca pembiayaan senjata ketika menginvasi Irak, akibatnya dunia mengalami krisis finansial global.

### 1.5. Asumsi Penelitian

Pertumbuhan ekonomi yang pesat membuat Jepang lebih berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi dan perdagangan internasional. Jepang kemudian mendapat julukan *Raksasa Ekonomi yang tidak memiliki kekuasaan politik*. Karena hal itu, negara-negara Barat menganggap Jepang yang telah melakukan

liberalisasi ekonomi hanya mementingkan dan memperkaya dirinya sendiri tanpa mau peduli terhadap situasi politik dunia.

Dalam perkembangannya, anggapan tersebut tidak hanya dirasakan oleh negara-negara Barat tetapi juga mulai mempengaruhi negara-negara kawasan Asia Tenggara yang pada saat itu telah menjadi ladang ekonomi Jepang. Karena adanya anggapan itulah mulai timbul gerakan anti Jepang yang menuduh Jepang telah melakukan *economy colonized* atau *economic animal*. Puncak dari gerakan anti Jepang tersebut adalah terjadinya sebuah peristiwa yaitu Tragedi Malari.

Akibatnya, untuk mengatasi beberapa hal di atas Jepang mulai melakukan berbagai cara dan menerapkan hal yang dianggap dapat memulihkan hubungannya dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Jepang akhirnya melakukan perubahan strategis politik luar negeri dan diplomasi baru di akhir 1970-an. Perubahan mulai terlihat setelah Jepang melakukan beberapa kali pergantian PM, dari Tanaka Kakuei, Miki Takeo hingga Fukuda Takeo. Akhirnya Jepang melalui PM Fukuda membuat diplomasi bentuk baru yaitu *heart to heart diplomacy* dengan Doktrin Fukuda sebagai sarana merealisasikan hal tersebut.

#### **1.6. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan melihat 2 sisi yaitu :

- 1.6.1. **Historis** yaitu dengan melihat sejarah dari Politik Luar Negeri Jepang setelah PD II hingga dikeluarkannya Doktrin Fukuda oleh PM Fukuda Takeo.
- 1.6.2. **Behavioralis** yaitu dengan melihat perilaku yang ada setelah dikeluarkannya Doktrin Fukuda oleh PM Fukuda Takeo.

Sedangkan untuk pengumpulan data, menggunakan metode kepustakaan / literature yaitu data dan informasi yang didapat diperoleh dengan bantuan dari bermacam-macam sumber yang terdapat di ruangan kepustakaan, seperti buku-buku, majalah, koran-koran, data internet dan lainnya. Masa Penelitian efektif adalah selama 6 bulan.

### 1.7. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

- 1.7.1. Menjelaskan perubahan strategis politik luar negeri Jepang di Asia Tenggara pada akhir 1970-an.
- 1.7.2. Menjelaskan munculnya Doktrin Fukuda yang membawa era baru bagi diplomasi Jepang, dengan masuknya unsur *Heart to Heart Diplomacy*.

### 1.8. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat menambah pemahaman tentang Teori *Soft Power*. Selain itu juga memberi masukan di dalam menelaah permasalahan yang terkait dengan politik luar negeri Jepang dalam memperbaiki citranya di depan negara-negara ASEAN. Kebijakan luar negeri Jepang yang digunakan Perdana Menteri Fukuda Takeo dalam usahanya untuk memperbaiki dan memperkuat hubungannya dengan ASEAN karena ASEAN memiliki arti penting bagi Jepang. Yang menarik adalah apapun yang dilakukan Jepang terhadap negara-negara ASEAN pada akhirnya akan tetap menunjukkan kekuasaan Jepang.

### 1.9. Tinjauan Pustaka

Beberapa hasil penelitian tentang Kebijakan Luar Negeri Fukuda Takeo dan *Soft Power* telah dilakukan. Terdapat 2 (dua) studi berdasarkan pendekatan kebijakan luar negeri Fukuda Takeo dan *Soft Power*, yaitu Indra Gunawan yang meneliti tentang Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap Asia Tenggara pada era Fukuda (1976-1978) : kasus Hubungan antar Birokrat dan Politisi dalam Proses Perumusannya<sup>18</sup>, sedangkan penulis meneliti tentang kasus Doktrin Fukuda. Penelitian lainnya yang telah dilakukan adalah Wida Kusumaningtyas dengan menyajikan mengenai Budaya Pop sebagai Sumber Daya *Soft Power* Amerika Serikat<sup>19</sup>, sedangkan dalam penelitian ini penulis menyajikan mengenai

<sup>18</sup> Indra Gunawan, *Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap Asia Tenggara pada era Fukuda (1976-1978) : kasus Hubungan antar Birokrat dan Politisi dalam Proses Perumusannya*, FISIP UI, Depok.

<sup>19</sup> Wida Kusumaningtyas, *Budaya Pop sebagai Sumber Daya Soft Power Amerika Serikat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.

pelaksanaan Doktrin Fukuda dan kesesuaiannya dengan *Soft Power* dalam kebijakan luar negeri Jepang di ASEAN.

#### **1.10. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas secara garis besar dari uraian penelitian ini, serta mempermudah penyusunan tesis ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

**BAB I** : PENDAHULUAN merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, batasan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II**: ASEAN dan KEPENTINGAN ASEAN merupakan bab yang berisi tentang sejarah berdirinya, deklarasi, tujuan, prinsip dan Kepentingan Jepang dengan dan di ASEAN.

**BAB III** : POLITIK LUAR NEGERI JEPANG SETELAH PERANG DUNIA II SAMPAI DENGAN 1970-an merupakan bab yang berisi tentang Politik Luar Negeri Jepang setelah Perang Dunia dilihat dari kebijakan para Perdana Menterinya. Selain itu juga akan dibahas tentang penggunaan teori *Soft Power* dengan kebijakan politik luar negeri Jepang.

**BAB IV** : PERUBAHAN KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI JEPANG DI ASEAN merupakan bab yang berisi tentang Kebijakan Politik Luar Negeri Jepang di ASEAN dan Perdana Menteri yang berperan penting. Akan dibahas pula mengenai Perdana Menteri Fukuda Takeo, Riwayat, Karier dan Kebijakannya. Selain itu juga dijelaskan Perubahan Strategis Kebijakan Luar Negeri Jepang, kondisi negara-negara ASEAN pada saat itu dan pendekatan teori *Soft Power* pada kasus Doktrin Fukuda.

**BAB V** : PENUTUP merupakan bab yang berisi kesimpulan yang mengungkapkan kembali permasalahan penelitian dengan hasil-hasil yang telah dilakukan.

**BAB II**  
**ASEAN (ASSOCIATION SOUTH EAST ASIA NATIONS)**  
**DAN KEPENTINGAN JEPANG**

**2.1. Sejarah ASEAN**

Asia Tenggara adalah salah satu kawasan di Asia dan juga sebuah kawasan yang di dalamnya terdiri dari banyak negara. Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Vietnam dan negara baru Timor Leste.

Sekitar tahun 1960-an negara-negara di Asia Tenggara memiliki keinginan akan kestabilan lingkungan eksternal sehingga para elit yang duduk di pemerintahan dapat berkonsentrasi pada pembangunan bangsa, adanya sebuah perasaan ketakutan yang sama terhadap komunisme dan berkurangnya kepercayaan atau ketidakpercayaan terhadap kekuasaan eksternal serta sebagai aspirasi untuk pembangunan ekonomi nasional. Untuk memenuhi beberapa keinginan tersebut maka beberapa negara Asia Tenggara membentuk sebuah organisasi kawasan Asia Tenggara.

Organisasi itu adalah ASEAN (*Association South East Asia Nation*). ASEAN dibentuk atas prakarsa dari 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina. Ke-5 negara itu sepakat dan selanjutnya ASEAN dideklarasikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 08 Agustus 1967.<sup>20</sup> Bunyi Deklarasi tersebut adalah sebagai berikut :

*FIRST, the establishment of an Association for Regional Cooperation among the countries of South-East Asia to be known as the Association of South-East Asian Nations (ASEAN).*

(Pertama, pembentukan sebuah Asosiasi Kerjasama Regional di antara negara-negara Asia Tenggara dikenal sebagai *Association of South-East Asian Nations*

---

<sup>20</sup> *Bangkok Declaration (1967).*  
<<http://www.asean.org/1212.htm>>

(ASEAN)).

*SECOND, that the aims and purposes of the Association shall be:*

**(Kedua, bahwa sasaran dan tujuan dari Asosiasi adalah:**

1. *To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of South-East Asian Nations;*
- (1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan budaya di kawasan melalui usaha bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka untuk memperkuat landasan untuk kemakmuran dan perdamaian masyarakat negara-negara Asia Tenggara;)
2. *To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter;*
- (2. Untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui patuh hormat terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antar negara di kawasan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip Piagam PBB;)
3. *To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, cultural, technical, scientific and administrative fields;*
- (3. Aktif untuk meningkatkan kerjasama dan saling membantu mengenai hal-hal yang umum dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah dan bidang administrasi;)
4. *To provide assistance to each other in the form of training and research facilities in the educational, professional, technical and administrative spheres;*

(4. Untuk memberikan bantuan kepada satu sama lain dalam bentuk pelatihan dan penelitian di fasilitas pendidikan, profesional, teknis dan bidang administratif ;)

*5. To collaborate more effectively for the greater utilization of their agriculture and industries, the expansion of their trade, including the study of the problems of international commodity trade, the improvement of their transportation and communications facilities and the raising of the living standards of their peoples;*

(5. Untuk berkolaborasi secara lebih efektif untuk pemanfaatan yang lebih besar dari pertanian dan industri mereka, perluasan perdagangan mereka, termasuk kajian terhadap masalah perdagangan komoditi internasional, perbaikan sarana transportasi dan fasilitas komunikasi dan meningkatkan standar hidup dari masyarakat mereka;)

*6. To promote South-East Asian studies;*

(6. Untuk mempromosikan pendidikan Asia Tenggara;)

*7. To maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organizations with similar aims and purposes, and explore all avenues for even closer cooperation among themselves.*

(7. Untuk menjaga kedekatan dan manfaat kerjasama dengan organisasi internasional dan regional yang memiliki sasaran dan tujuan yang sama, dan mencari segala cara bahkan kedekatan kerjasama di antara mereka.)

**THIRD**, that to carry out these aims and purposes, the following machinery shall be established:

(Ketiga, bahwa untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut, berikut perlengkapan yang akan didirikan:)

(a) *Annual Meeting of Foreign Ministers, which shall be by rotation and referred to as ASEAN Ministerial Meeting. Special Meetings of Foreign*

*Ministers may be convened as required.*

- (a) Pertemuan Tahunan Menteri Luar Negeri, yang akan menjadi oleh rotasi dan disebut sebagai Pertemuan Menteri ASEAN. Pemanggilan Rapat khusus Menteri Luar Negeri disesuaikan dengan yang diperlukan.)
- (b) *A Standing committee, under the chairmanship of the Foreign Minister of the host country or his representative and having as its members the accredited Ambassadors of the other member countries, to carry on the work of the Association in between Meetings of Foreign Ministers.*
- (b) Komite, di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri dari negara penyelenggara atau yang mewakili dan anggotanya Duta resmi dari negara-negara anggota lainnya, untuk melakukan pekerjaan dari Asosiasi dalam Rapat antara Menteri Luar Negeri.)
- (c) *Ad-Hoc Committees and Permanent Committees of specialists and officials on specific subjects.*
- (c) Komite Ad-Hoc dan Komite Tetap Khusus dan pejabat di persoalan tertentu.)
- (d) *A National Secretariat in each member country to carry out the work of the Association on behalf of that country and to service the Annual or Special Meetings of Foreign Ministers, the Standing Committee and such other committees as may hereafter be established.*
- (d) Sekretariat Nasional di masing-masing negara anggota untuk melaksanakan tugas dari Asosiasi atas nama negara tersebut dan untuk melayani Rapat Tahunan atau Rapat Khusus Menteri Luar Negeri, Komite Tetap dan Komite lainnya seperti yang selanjutnya akan didirikan.)

***FOURTH, that the Association is open for participation to all States in the South-East Asian Region subscribing to the aforementioned aims, principles and purposes.***

(Keempat, bahwa Asosiasi ini terbuka bagi semua negara untuk berpartisipasi di kawasan Asia Tenggara yang berjanji untuk melaksanakan sasaran, prinsip dan tujuan yang tersebut.)

*FIFTH, that the Association represents the collective will of the nations of South-East Asia to bind themselves together in friendship and cooperation and, through joint efforts and sacrifices, secure for their peoples and for posterity the blessings of peace, freedom and prosperity.*<sup>21</sup>

(Kelima, bahwa Asosiasi mewakili keinginan kolektif dari bangsa-bangsa Asia Tenggara untuk mengikat dirinya bersama dalam persahabatan dan kerjasama dan, melalui upaya bersama dan pengorbanan, keamanan bagi bangsa dan berkat perdamaian untuk anak cucu mereka, kebebasan dan kesejahteraan.)

Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dari ke-5 negara yang telah disebutkan sebelumnya. Mereka adalah :

1. Adam Malik dari Indonesia;
2. Tun Abdul Razak dari Malaysia;
3. S. Rajaratnam dari Singapura;
4. Thanat Khoman dari Thailand; dan
5. Narciso Ramos dari Filipina<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Bangkok Declaration (1967).*  
<<http://www.asean.org/1212.htm>>

<sup>22</sup> *Ibid.*

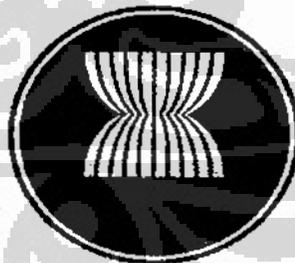
**Gambar 1. Suasana Penandatanganan dibentuknya ASEAN**

(Sumber: <http://www.youtube.com/watch?v=ZfHJdhVdIIQ>)



**Gambar 2. Lambang ASEAN**

(Sumber: <http://www.asean.org/logo/nlogo.gif>)



ASEAN memiliki suatu Lambang khusus. Lambang ASEAN seperti yang terlihat di atas juga memiliki arti tersendiri. Lambang tersebut mewakili Stabilitas, Perdamaian, Persatuan dan Dinamisnya ASEAN. Berdasarkan warnanya terdapat 4 warna yaitu Biru, Merah, Putih dan Kuning. Untuk warna Biru berarti Perdamaian dan Stabilitas, warna Merah menggambarkan Keberanian dan Dinamis, warna Putih menunjukkan Kesucian dan warna Kuning menyimbolkan

Kemakmuran.<sup>23</sup> Dari warna itu menunjukkan bagaimana agar ASEAN selalu menjaga perdamaian, stabilitas, keberanian, kedinamisan, kesucian dan kemakmuran serta adanya harapan agar ASEAN selalu berada dalam keadaan tersebut.

Sedangkan untuk gambarnya juga memiliki filosofi tersendiri. Gambar 10 batang padi mewakili mimpi yang diusung oleh para pendiri ASEAN. Mimpi itu adalah agar ASEAN yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara tersebut terikat bersama dalam Persahabatan dan Solidaritas satu kawasan. Untuk Bulatan yang ada di gambar melambangkan Kesatuan ASEAN.<sup>24</sup> Dari gambar yang terdapat pada lambang ASEAN diharapkan bahwa 10 negara anggota agar dapat selalu bersatu dan terikat bersama dalam persahabatan dan solidaritas antar negara sekawasan.

Seperti halnya lambang, ASEAN juga memiliki Hymne dan Lagu-lagu tentang ASEAN. Hymne ASEAN berjudul *ASEAN Song For Unity* yang musiknya dibuat oleh Ryan Cayabyab dan liriknya ditulis oleh Nicanor G. Tiongson.<sup>25</sup> Sedangkan Lagu-lagu yang bertemakan ASEAN adalah *Let Us Move Ahead* diciptakan oleh Candra Darusman, liriknya ditulis oleh Rizali Indrakesuma dan musiknya diaransemen oleh Erwin Gutawa, dan *ASEAN We Are One*.<sup>26</sup>

Dalam perkembangannya hingga kini ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara. Negara-negara yang baru bergabung yaitu :

6. Brunei Darussalam pada 08 Januari 1984;
7. Vietnam pada 28 Juli 1995;
8. Laos pada 23 Juli 1997;
9. Myanmar pada 23 Juli 1997; dan

<sup>23</sup> *ASEAN Name and Logo.*

<<http://www.aseansec.org/7095.htm>>

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *ASEAN Hymn.*

<<http://www.aseansec.org/ASEANHymn.htm>>

<sup>26</sup> *Association of Southeast Asia Nations.*

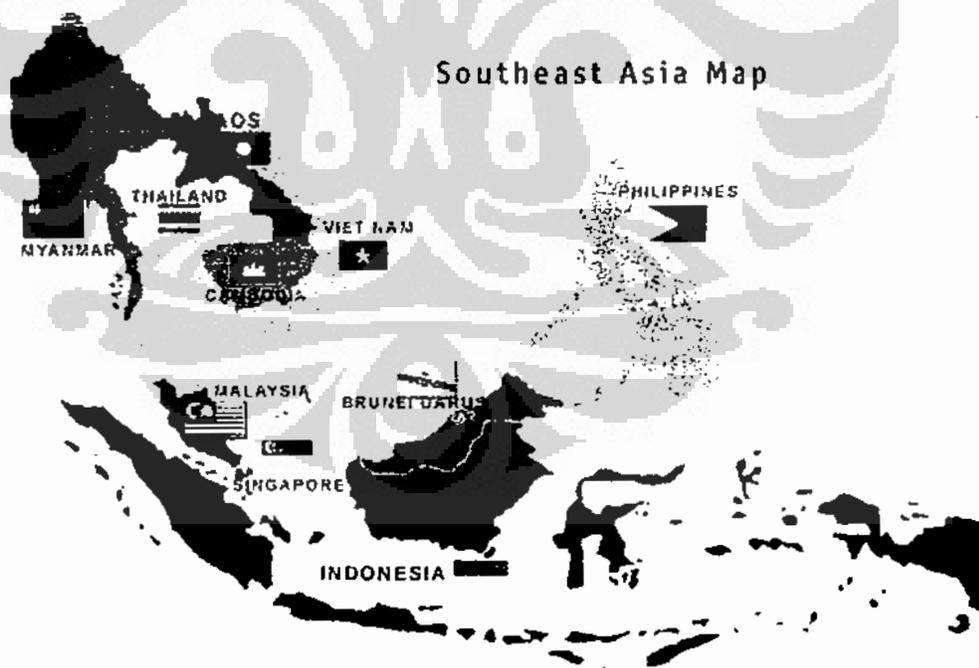
<<http://www.youtube.com/watch?v=ZfHJdhVdIIQ>>

10. Kamboja pada 30 April 1999.<sup>27</sup>

Sedangkan negara lainnya yaitu Timor Leste yang dulu adalah bagian dari Indonesia belum menjadi anggota ASEAN. Walaupun sering dibantu dan diundang dalam beberapa pertemuan oleh ASEAN tetapi hingga kini posisi Timor Leste masih sebagai negara pemerhati (*Observer*). Menurut kabar terakhir yang beredar Timor Leste yang juga berada di kawasan Asia Tenggara melalui Kementerian Luar Negerinya telah menargetkan akan menjadi anggota ASEAN sebelum tahun 2012, hal ini pun diperkuat dengan fakta bahwa di Dili telah dibuka Sekretariat Nasional ASEAN pada bulan Februari 2009. Sekretariat itu akan digunakan untuk persiapan Timor Leste menjadi anggota ASEAN. Keinginan Timor Leste untuk masuk dalam ASEAN ini disambut baik oleh negara-negara anggota lainnya seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura dan juga yang lainnya.<sup>28</sup> Berikut adalah peta ASEAN :

Gambar 3. Peta negara-negara anggota ASEAN

(Sumber: [http://www.aseansec.org/images/map\\_all.gif](http://www.aseansec.org/images/map_all.gif))



<sup>27</sup> *Overview: Association of Southeast Asia Nations.*

<<http://www.asean.org/64.htm>>

<sup>28</sup> *Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara.*

<[http://www.id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan\\_Bangsa-bangsa\\_Asia\\_Tenggara](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-bangsa_Asia_Tenggara)>

Prinsip-prinsip utama ASEAN adalah sebagai berikut:

- *mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity, and national identity of all nations;*  
(Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara)
- *the right of every State to lead its national existence free from external interference, subversion or coercion;*  
(Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar)
- *non-interference in the internal affairs of one another;*  
(Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota)
- *settlement of differences or disputes by peaceful manner;*  
(Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai)
- *renunciation of the threat or use of force; and*  
(Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan)
- *effective cooperation among themselves.*<sup>29</sup>  
(Kerjasama efektif antara anggota)

ASEAN dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang sekarang dijabat oleh Surin Pitsuwan asal Thailand. Sekretaris Jenderal ASEAN diangkat berdasarkan jasa dan status persetujuan kementerian. Memiliki masa jabatan selama 5 tahun, diberikan mandat untuk mengajukan, memberitahu, mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN.<sup>30</sup>

Kantor Sekretariat ASEAN berada di Jakarta, Indonesia. Keputusan tertinggi di ASEAN adalah Pertemuan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang diadakan setiap tahunnya. Begitu pula dengan Pertemuan para Menteri Luar Negeri. Pertemuan Tingkat Menteri lainnya juga secara reguler dilakukan seperti Pertanian dan Kehutanan, Ekonomi (Perdagangan), Energi, Lingkungan, Keuangan, Kesehatan, Informasi, Investasi, Perburuhan, Hukum, Pembangunan

<sup>29</sup> *Overview: Association of Southeast Asia Nations.*

<<http://www.asean.org/64.htm>>

<sup>30</sup> *Ibid.*

Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan, Ilmu dan Teknologi, Kesejahteraan Sosial, Telekomunikasi, Kejahatan Transnasional, Transportasi, Pariwisata, dan Pemuda.<sup>31</sup>

ASEAN juga mengadakan pertemuan antar negara-negara anggotanya. Biasa dikenal dengan Konferensi Tingkat Tinggi, masing-masing Kepala Pemerintahan negara anggota bertemu dan membicarakan tentang masalah terkini yang terjadi di kawasan Asia Tenggara serta mencari penyelesaiannya. Pertemuan ASEAN ini pada awalnya tidak memiliki jadwal tertentu. Dimulai tahun 2001 pertemuan diadakan setahun sekali. Akhirnya pada Desember 2008 melalui piagam ASEAN akhirnya diputuskan pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN akan dilakukan setiap 2 tahun sekali. Di bawah ini adalah tabel yang berisi tentang pertemuan Tingkat Tinggi Resmi ASEAN di mana pernah dilakukan :

**Tabel 4. Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN<sup>32</sup>**

No	Tanggal	Negara	Tuan Rumah
1.	23-24 Februari 1976	Indonesia	Bali
2.	04-05 Agustus 1977	Malaysia	Kuala Lumpur
3.	14-15 Desember 1987	Filipina	Manila
4.	27-29 Januari 1992	Singapura	Singapura
5.	14-15 Desember 1995	Thailand	Bangkok
6.	15-16 Desember 1998	Vietnam	Hanoi
7.	05-06 November 2001	Brunei Darussalam	Bandar Seri Begawan
8.	04-05 November 2002	Kamboja	Phnom Penh
9.	07-08 Oktober 2003	Indonesia	Bali
10.	29-30 November 2004	Laos	Vientiane
11.	12-14 Desember 2005	Malaysia	Kuala Lumpur
12.	11-14 Januari 2007	Filipina	Cebu
13.	18-22 November 2007	Singapura	Singapura
14.	27 Februari-01 Maret 2009 10-11 April 2009	Thailand	Cha Am, Hua Hin Pattaya

ASEAN memiliki beberapa badan-badan khusus dan perjanjian-perjanjian

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *ASEAN.*

<<http://www.en.wikipedia.org/wiki/Asean>>

dalam mempromosikan kerjasama antar pemerintah di berbagai bidang termasuk yang berikut ini: *ASEAN Agricultural Development Planning Centre, ASEAN-EC Management Centre, ASEAN Centre for Energy, ASEAN Earthquake Information Centre, ASEAN Foundation, ASEAN Poultry Research and Training Centre, ASEAN Regional Centre for Biodiversity Conservation, ASEAN Rural Youth Development Centre, ASEAN Specialized Meteorological, ASEAN Timber Technology Centre, ASEAN Tourism Information Centre, dan ASEAN University Network.*<sup>33</sup>

Selain itu, ASEAN mempromosikan dialog dan konsultasi dengan organisasi profesional dan bisnis yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dari ASEAN, seperti *ASEAN-Chambers of Commerce and Industry, ASEAN Business Forum, ASEAN Tourism Association, ASEAN Council on Petroleum, ASEAN Ports Association, Federation of ASEAN Shipowners, ASEAN Confederation of Employers, ASEAN Fisheries Federation, ASEAN Vegetable Oils Club, ASEAN Intellectual Property Association, and the ASEAN-Institutes for Strategic and International Studies.* Selain itu, terdapat 58 Organisasi Non Pemerintah (LSM), yang memiliki afiliasi resmi dengan ASEAN.<sup>34</sup>

## 2.2. Kepentingan Jepang di ASEAN

Hubungan ASEAN dan Jepang dimulai pada tahun 1973 dan berkembang menjadi hubungan formal pada tahun 1977 bersamaan dengan dibukanya Forum ASEAN-Jepang. Semenjak itu hubungan kedua negara mengalami kemajuan yang signifikan. Perluasan kerjasama dan hubungan yang bersifat lebih dalam antara keduanya meliputi berbagai bidang di masing-masing negara. Bidang-bidang tersebut adalah Politik dan Keamanan, Ekonomi dan Keuangan, dan Sosial Budaya masing-masing kawasan.

Lebih lanjut hubungan kedua negara ditingkatkan dan semakin diperkuat dengan penandatanganan *Tokyo Declaration for the Dynamic and Enduring*

---

<sup>33</sup> *Overview: Association of Southeast Asia Nations.*  
<<http://www.asean.org/64.htm>>

<sup>34</sup> *Ibid.*

*ASEAN-Japan Partnership in the New Millennium* (Deklarasi Tokyo Untuk Kemitraan ASEAN-Jepang yang Dinamis dan Kekal pada Era Milenium Baru). Kemudian dengan mengangkat *ASEAN-Japan Plan of Action* (Rencana Aksi ASEAN-Jepang) yang diselenggarakan memperingati Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Jepang tanggal 11-12 Desember 2003 di Tokyo. Terdapat 3 macam Kerjasama antara ASEAN dan Jepang, antara lain Kerjasama Politik dan Keamanan, Kerjasama Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan

Asia Tenggara sendiri merupakan kawasan yang memiliki arti penting bagi Jepang. ASEAN menjadi pilihan kedua Jepang setelah AS dan negara-negara industri maju lainnya. Terutama di bidang Ekonomi dan Bisnis. Hal inilah yang turut mempengaruhi Jepang untuk berinisiatif menjalin hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara. Adapun 3 alasan yang dapat memperkuat pernyataan di atas, yaitu:

1. Secara geopolitik kawasan Asia Tenggara menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, yang sangat penting bagi Jepang guna mengontrol dan berkomunikasi dengan Eropa dan Timur Tengah. Sekitar 85 % minyak Jepang diimpor dari Timur Tengah melewati perairan Asia Tenggara, terutama di Selat Malaka dan Selat Lombok. Selain itu, Jepang memperoleh sekitar 13 % impor komoditas dari negara-negara Uni Eropa.
2. Asia Tenggara memiliki Jumlah Populasi dan Sumber Daya Alam yang kaya dan berlimpah. Untuk Jumlah Populasinya ASEAN lebih dari 550 juta, jumlah ini 5x lipat dari Jepang. Dengan perincian data sebagai berikut:
  - a. Indonesia dengan populasi penduduk 219.205.000.
  - b. Malaysia dengan populasi penduduk 26.127.700.
  - c. Thailand dengan populasi penduduk 64.763.000.
  - d. Singapura dengan populasi penduduk 4.198.000 (2004).
  - e. Filipina dengan populasi penduduk 85.236.900.
  - f. Brunei Darussalam dengan populasi penduduk 370.100 (2005).
  - g. Vietnam dengan populasi penduduk 83.119.900.
  - h. Laos dengan populasi penduduk 5.938.800.

- i. Myanmar dengan populasi penduduk 56.002.600 (2005).
- j. Kamboja dengan populasi penduduk 13.661.400.<sup>35</sup>

Hal ini merupakan pasar yang potensial dan nyata, yang sangat menarik bagi ekspor barang-barang industri Jepang. Begitu pula dengan Sumber Daya Alam kawasannya seperti minyak di Indonesia.

3. Stabilitas Politik dan Ekonomi Asia Tenggara bagi Jepang sebagai bentuk keseimbangan dengan China. Menurut sejarah Cina telah dianggap sebagai Asia Tenggara di dalam bidang yang mempengaruhi pandangan dan diakui oleh Amerika Serikat serta beberapa negara Asia Tenggara, dan dibuktikan oleh Cina yang menawarkan bantuan kepada Vietnam Utara untuk menekan Selatan selama Perang Vietnam.<sup>36</sup>

Selain 3 alasan di atas ASEAN juga merupakan kawasan yang strategis dan memiliki arti penting bagi Jepang. Selain sebagai sumber bahan baku dan pasar bagi Jepang, ASEAN juga berada pada posisi geografis laut di sepanjang jalur komunikasi yang menghubungkan Jepang dengan pasokan minyak dari Timur Tengah. Dengan demikian, menurut Jepang keamanan dari negara-negara ASEAN sangat penting untuk Jepang sendiri. Sebaliknya Jepang akan berupaya untuk melakukan kontribusi langsung terhadap keamanan ASEAN dengan Diplomasi dan Ekonomi.

---

<sup>35</sup> *Member Countries*,  
<<http://www.asean.org>>

<sup>36</sup> Nishihara Masashi, *ASEAN-JAPAN Cooperation : Japan's Political and Security Relations with ASEAN*, Japan Center for International Exchange, Tokyo, 2003, hal. 156-157

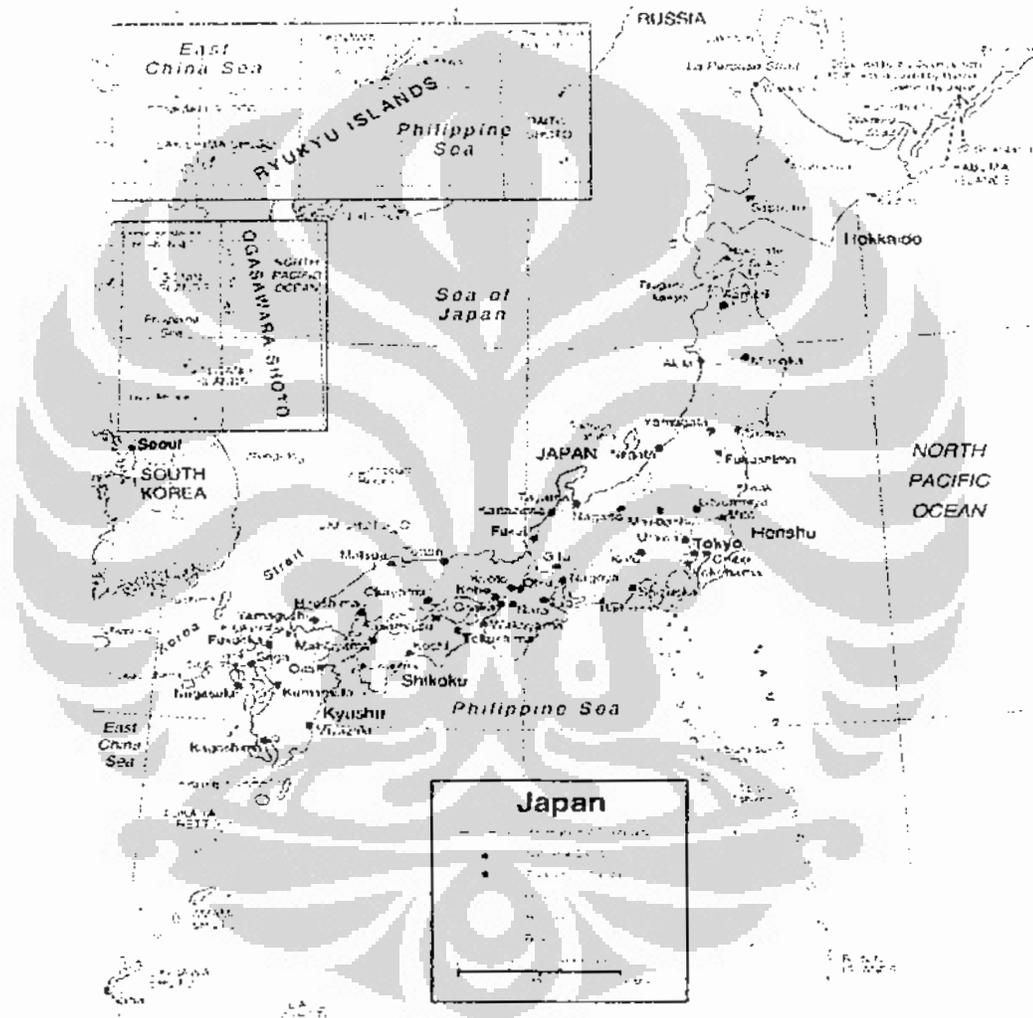
### BAB III

## POLITIK LUAR NEGERI JEPANG

### SETELAH PERANG DUNIA II SAMPAI DENGAN 1970-an

Gambar 4. Peta Jepang

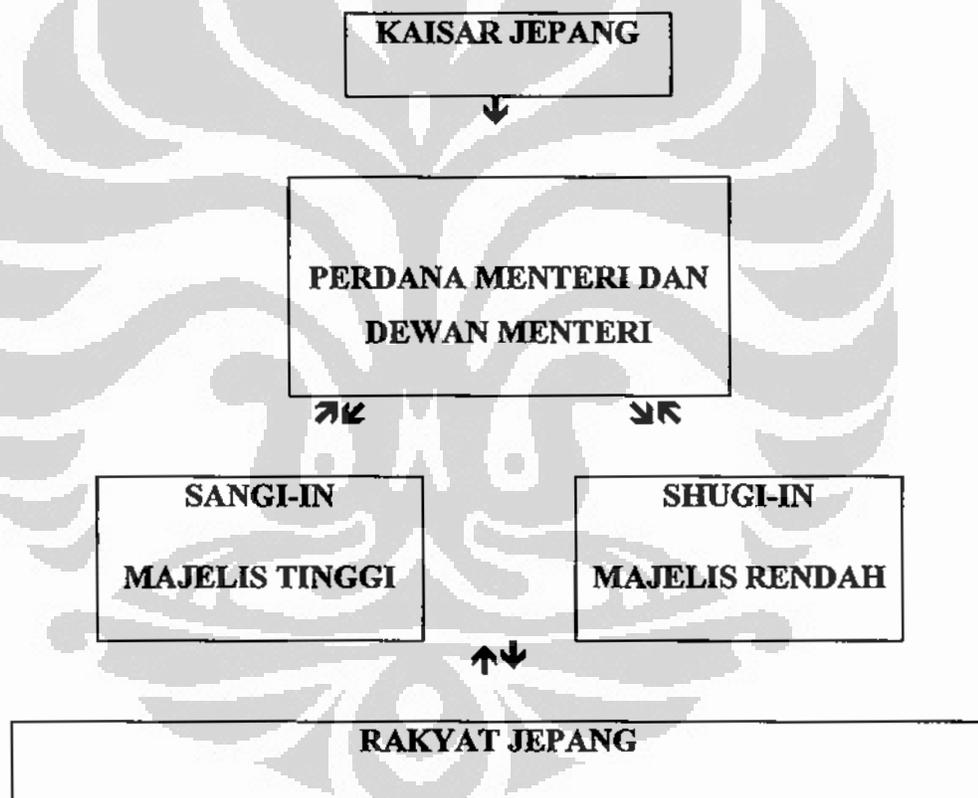
(<http://www.map-of-japan.org/map-of-japan.gif>)



Jepang adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Timur. Jepang berbatasan dengan Korea dan China di sebelah barat, Taiwan di sebelah selatan, Rusia di sebelah utara dan Samudera Pasifik di sebelah selatan. Jepang merupakan negara yang berbentuk kepulauan yang terdiri dari 4 pulau utama yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku dan Kyushu yang dibagi menjadi 9 region dan 47 prefektur.

Jepang memiliki kepala negara seorang Kaisar sedangkan pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. PM membawahi kabinet yang terdiri dari Dewan Menteri. Parlemen Jepang yang biasa disebut *Kokkai* atau Diet terdiri dari 2 Majelis, yaitu *Shugi-in* (Majelis Rendah) yang mempunyai 480 buah kursi dan *Sangi-in* (Majelis Tinggi) yang memiliki 247 buah kursi.<sup>37</sup> PM dan Dewan Menteri di kabinet bertanggungjawab kepada Diet. PM harus menjadi anggota Diet dan dipilih oleh anggota lainnya. Di bawah ini adalah bagan sistem pemerintahan Parlemen Jepang:

Bagan 1. Sistem Pemerintahan Parlemen Jepang<sup>38</sup>



Sebelum PD II terjadi di Eropa sedang terjadi kebangkitan Fasisme yang mengembangkan pemerintahan diktator militer. Ada 2 negara besar yang mendukung gerakan Fasisme. Negara-negara tersebut adalah Jerman yang

<sup>37</sup> Agus Suryana, *Profil Negara : Negara Macan Asia, NAFTA & Uni Eropa*, Harapan Baru Raya, Jakarta, 2005, hal. 16

<sup>38</sup> Drs. H. Inu Kencana Syafie, M.Si dan Drs. Andi Azikin, M.Si, *Perbandingan Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 41

dipimpin oleh Adolf Hitler yang berkuasa dengan partai Nazinya dan Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini juga berkuasa dengan partai Fasisnya. Hal inilah rupanya yang kemudian turut menggerakkan para tokoh militer Jepang untuk bergabung bersama kedua negara tersebut. Kemudian Jepang, Jerman dan Italia menandatangani perjanjian pada tanggal 27 Desember 1940 untuk saling membantu di berbagai bidang yaitu politik, ekonomi dan militer.<sup>39</sup> Tetapi gerakan Fasisme tidak bertahan lama karena rakyat dan negara yang mendukung perdamaian menginginkan Demokrasi melakukan perlawanan. Negara-negara tersebut bergabung dan berperang melawan Jerman. Hal ini kemudian berkembang menjadi PD II antara Demokrasi melawan Fasisme. PD II pun terjadi dan Jepang bersama Jerman dan Italia mengalami kekalahan pada PD II.

Sebelum dan selama PD II Jepang dikenal sebagai satu-satunya negara Asia di dunia yang mampu bersaing dengan negara-negara besar yaitu AS dan negara-negara Eropa. Jepang adalah negara militeristik ekspansionis. Banyak negara-negara di Asia yang telah dijajahnya, salah satunya adalah Indonesia. Tetapi setelah PD II berakhir dengan menyakitkan bagi Jepang, Jepang pun mulai berubah. Jepang menjadi negara pasifis yang demokratis.<sup>40</sup>

### 3.1. Politik Luar Negeri Jepang Setelah Perang Dunia II

Setelah menandatangani kerjasama dengan AS dalam Perjanjian Kerjasama Saling Menguntungkan dan Keamanan, Jepang mulai bergantung dengan AS. Tidak hanya di bidang Militer dan Diplomatik, tetapi juga ketergantungan di bidang Ekonomi. Jepang mengizinkan AS menjadikan Okinawa sebagai basis pangkalan militer AS di kawasan Asia Timur. Tidak hanya itu, pengaruh AS juga sangat besar bagi Jepang. Jepang juga mengikuti AS dalam isu Kebijakan Luar Negerinya.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 39

<sup>40</sup> Fajar Iriani Sophiaan Yudoyoko, Jun Honna, Meidi Kosandi, *Dinamika Hubungan Sipil Militer dalam Sistem Politik Jepang*, Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, Depok, 2006, hal. 55

Adapun isi dari Perjanjian Keamanan pada 8 September 1951 di San Francisco<sup>41</sup> adalah sebagai berikut :

***Security Treaty (Perjanjian Keamanan)***

***Between the United States and Japan (Antara AS dan Jepang)***

***Article I***

*Japan grants, and the United States of America accepts the right, upon the coming into force of the Treaty of Peace and of this Treaty, to dispose United States land, air, and sea forces in and about Japan. Such forces may be utilized to contribute to the maintenance of the international peace and security in the Far East and to the security of Japan against attack from without, including assistance given at the express request of the Japanese Government to put down large-scale internal riots and disturbances in Japan, caused through instigation or intervention by an outside Power or Powers.*

**Pasal 1**

Jepang memberikan, dan AS menerima hak, yang sedang akan datang dan berlaku ke dalam kekuatan dari Perjanjian Perdamaian dan dari Perjanjian ini, untuk mengatur kekuatan darat, udara dan laut AS di Jepang dan sekitarnya. Kekuatan itu dapat dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi kepada pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional di Timur Jauh dan keamanan Jepang terhadap serangan, termasuk bantuan yang diberikan pada saat ada permintaan cepat pemerintah Jepang untuk meletakkan skala besar kerusuhan internal dan kekacauan di Jepang, yang disebabkan melalui hasutan atau intervensi kekuasaan dari luar).

***Article II***

*During the exercise of the right referred to in Article I, Japan will not grant, without the prior consent of the United States of America, any bases or any rights,*

---

<sup>41</sup> Glenn D. Hook, Julie Gilson, Christopher W. Hughes, Hugo Dobson, *Japan's International Relations : Politics, Economics and Security*, Routledge, New York, 2005, hal. 561-562

*power, or authority whatsoever, in or relating to bases or the right of garrison or of maneuver, or transit of ground, air, or naval forces to any third Power.*

## **Pasal 2**

(Selama pelaksanaan hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, Jepang tidak akan memberikan, tanpa izin terlebih dahulu dari AS, apapun dasar atau hak, kekuasaan, atau wewenang apapun, atau yang berkaitan dengan dasar atau hak mengasramakan atau pergerakan tentara, atau melintasi daratan, udara atau pangkalan angkatan laut kepada kekuasaan pihak ketiga).

## **Article III**

*The conditions which shall govern the disposition of armed forces of the United States of America in and about Japan shall be determined by administrative agreements between the two Governments.*

## **Pasal 3**

(Keadaan dimana yang akan memerintah pembagian angkatan bersenjata AS di Jepang dan sekitarnya akan ditentukan oleh persetujuan administrasi di antara kedua pemerintah).

## **Article IV**

*This Treaty shall expire whenever in the opinion of the Governments of the United States of America and of Japan there shall have come into force such United Nations arrangements or such alternative individual or collective security dispositions as will satisfactorily provide for the maintenance by the United Nations or otherwise of international peace and security in the Japan Area.*

## **Pasal 4**

(Perjanjian ini akan berakhir bila dalam pendapat pemerintah AS dan Jepang dimana akan mulai berlaku kekuasaan seperti perjanjian PBB atau semacam alternatif individu atau pembagian keamanan kolektif yang akan memuaskan

penyediaan untuk pemeliharaan oleh PBB atau sebaliknya perdamaian dan keamanan internasional di wilayah Jepang).

#### **Article V**

*This Treaty shall be ratified by the United States of America and Japan and will come into force when instruments or ratification thereof have been exchanged by them at Washington.*

#### **Pasal 5**

(Perjanjian ini akan diratifikasi oleh AS dan Jepang dan akan mulai berlaku sebagai kekuatan ketika alat-alat atau ratifikasi daripada ini telah ditukar oleh kedua pihak di Washington).

Berdasarkan Perjanjian Keamanan antara Jepang dan AS dijelaskan bahwa Jepang telah memberikan hak secara penuh kepada AS untuk mengatur kekuatan di wilayah Jepang dan sekitarnya. Kekuatan itu meliputi kekuatan darat, kekuatan udara dan kekuatan laut. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional di kawasan Timur Jauh tersebut. Khususnya terhadap ancaman serangan-serangan yang akan membahayakan Jepang dan intervensi kekerasan dari pihak luar. Jepang juga tidak akan membiarkan adanya pergerakan tentara atau angkatan bersenjata yang melintas tepat di atas wilayah daratan, udara dan pangkalan angkatan laut Jepang dari pihak negara ketiga tanpa adanya izin dari AS. Meskipun begitu, pembagian angkatan bersenjata AS di Jepang dan sekitarnya akan ditentukan berdasarkan persetujuan administrasi oleh kedua pemerintah Jepang dan AS.

Hubungan AS dan Jepang bersifat timbal balik. AS melindungi Jepang dari ancaman luar yang dinilai membahayakan bagi Jepang. Ini dikarenakan Jepang tidak lagi diperbolehkan memiliki kekuatan militer. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Jepang yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Undang-undang Dasar 1945 Jepang<sup>42</sup>

Kedaulatan	Kaisar	Perwakilan Rakyat	Perang dan Potensi Perang	Hak Asasi
Rakyat	Simbol negara dan 34symbol kesatuan rakyat	Terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Atas	Tidak mau terlibat dalam perang untuk selamanya dan tidak memiliki potensi	Dijamin secara luas sebagai Hak

Walaupun begitu, Jepang tetap memiliki pasukan bela diri yang maju. Pasukan bela diri Jepang digunakan untuk membela Jepang dan mendukung militer AS jika terlibat konflik regional.

Sejak itulah Kebijakan Luar Negeri Jepang mulai berkonsentrasi pada Ekonomi yaitu dengan melakukan perbaikan ekonomi. Perdagangannya mengalami surplus dan penanaman modal di luar negeri oleh perusahaan-perusahaan Jepang juga berkembang pesat. Begitu juga dengan Politik Luar Negerinya. Dengan dukungan dari AS, Jepang membayar biaya ganti rugi korban perang. Seiring dengan waktu, Ekonomi Jepang berkembang luar biasa. Tidak hanya ekonomi, Jepang juga mengandalkan Teknologi tinggi.

Sedangkan untuk Diplomasinya menurut *Blue Book* (buku mengenai Diplomatik Jepang) jilid pertama yang diterbitkan pada September 1967, menyebutkan 3 prinsip Diplomasi Jepang. Prinsip-prinsip tersebut adalah *The*

<sup>42</sup> Prof. Dr. I. Ketut Surajaya, M.A, *Bahan Kuliah : Pengantar Sejarah Jepang 2*, Jakarta, 2001, hal. 149

*United Nations centered diplomacy, Adherence to Japan as a member of Asia dan Cooperation with the free world countries.*<sup>43</sup>

Ketiga prinsip tersebut menjelaskan bentuk hubungan diplomasi yang dilakukan Jepang. Prinsip pertama adalah hubungan kerjasama multilateral atau internasional. Prinsip kedua adalah hubungan kerjasama regional sebagai negara Asia, dan prinsip ketiga adalah hubungan kerjasama bilateral antara 2 negara.

Dari hubungan bilateralnya dengan AS, Jepang mulai mengadopsi dan menerapkan liberalisasi ekonomi. Jepang memperbaiki ekonomi negaranya. Tepatnya pada saat kepemimpinan PM Yoshida Shigeru tahun 1951, Yoshida menandatangani sebuah Perjanjian dengan AS yang kemudian dikenal dengan *Yoshida's Doctrine*.

Dengan menonjolkan Ekonominya, Jepang menegaskan sikapnya menjauhi konflik-konflik politik dan keamanan dunia internasional. Secara perlahan tapi pasti dengan peningkatan Ekonominya yang luar biasa, Jepang tidak hanya berdiplomasi di kawasan regionalnya Asia Timur tetapi juga hingga kawasan Asia Tenggara. Melalui ADB, Jepang membantu negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN.

Jepang juga harus mengganti penderitaan yang dirasakan oleh negara-negara tetangganya di Asia Tenggara sebagai akibat yang ditimbulkan pada masa pendudukan perang. Jepang secara resmi diwajibkan untuk membayar perbaikan ke Vietnam Selatan, Indonesia, Myanmar dan Filipina, di samping itu berbagai kompensasi ke Laos, Kamboja, Thailand, Malaya dan Singapura. Perbaikan dan berbagai kompensasi tersebut diambil dari barang dan jasa Jepang. Hal ini tentunya turut memberikan kontribusi terhadap ekspansi Ekonomi Jepang dengan meningkatkan ekspornya. Jepang pun mulai memperluas bantuan pembangunan resminya (ODA). Industri Jepang yang memperkuat hubungan mereka dengan Asia Tenggara melalui perbaikan dan kompensasi menemukan ODA menjadi

---

<sup>43</sup> Hideki Kan, *Bahan Kuliah : Postwar Japanese Diplomacy : Agenda and Problems*, Depok, 2007, hal. 1

sumber dana lain yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan kegiatan bisnis di Asia Tenggara.

Begitu juga di tingkat pemerintahan, Jepang mencoba berinisiatif dalam bentuk pemberian bantuan pembangunan kepada perusahaan-perusahaan Asia Tenggara dengan menyelenggarakan untuk pertama kalinya Konferensi Tingkat Menteri untuk Pembangunan Ekonomi di Asia Tenggara pada tahun 1966.<sup>44</sup>

### 3.2. Kebijakan Perdana Menteri Jepang Setelah Perang Dunia II

#### 3.2.1. Perdana Menteri yang memerintah di Jepang Sejak Berakhirnya Perang Dunia II

Di bawah ini adalah nama-nama PM Jepang setelah PD II sampai dengan 1970-an :

**Tabel 6. Daftar nama-nama Perdana Menteri Jepang<sup>45</sup>**

No.	Nama Perdana Menteri	Masa Jabatan
1.	Higashikuni Naruhiko	17 Agustus 1945 – 09 Oktober 1945
2.	Shidehara Kijuro	09 Oktober 1945 – 22 Mei 1946
3.	Yoshida Shigeru	22 Mei 1946 – 24 Mei 1947
4.	Katayama Tetsu	24 Mei 1947 – 10 Maret 1948
5.	Ashida Hitoshi	10 Maret 1948 – 15 Oktober 1948
6.	Yoshida Shigeru	15 Oktober 1948 – 16 Februari 1949
7.	Yoshida Shigeru	16 Februari 1949 – 30 Oktober 1952
8.	Yoshida Shigeru	30 Oktober 1952 – 10 Desember 1954
9.	Hatoyama Ichiro	10 Desember 1954 – 22 November 1955
10.	Hatoyama Ichiro	22 November 1955 – 23 Desember 1956
11.	Ishibashi Tanzan	23 Desember 1956 – 25 Februari 1957
12.	Kishi Nobusuke	25 Februari 1957 – 19 Juli 1960
13.	Ikeda Hayato	19 Juli 1960 – 09 November 1964
14.	Sato Eisaku	09 November 1964 – 07 Juli 1972
15.	Tanaka Kakuei	07 Juli 1972 – 09 Desember 1974
16.	Miki Takeo	09 Desember 1974 – 24 Desember 1976

<sup>44</sup> Tanaka Akihiko, *ASEAN-Japan Cooperation : ASEAN-Japan Ties: A Basis for Cooperation*, Japan Center for International Exchange, Tokyo, 2003, hal. 20

<sup>45</sup> Glenn D. Hook, Julie Gilson, Christopher W. Hughes, Hugo Dobson, *Japan's International Relations : Politics, Economics and Security*, Routledge, New York, 2005, hal. 560

### 3.2.2. Kebijakan Perdana Menteri di Jepang

Kebijakan Jepang yang lain dapat dilihat dari PM yang menjabat. Menurut PM yang menjabat ada beberapa bentuk Kebijakan. Bentuk dari Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain berdasarkan Kebijakannya dalam Militer dan Kedaulatan Negara oleh Pangeran Higashikuni Naruhiko dan Shidehara Kijuro, berdasarkan Kepentingan yang Memihak pada Amerika Serikat oleh Shidehara Kijuro, Yoshida Shigeru, Kishi Nobusuke dan Tanaka Kakuei, dan berdasarkan Kebijakannya yang Memperhatikan Masalah Buruh di Jepang adalah Ikeda Hayato.

Selanjutnya PM yang Kebijakannya berdasarkan Kepentingannya dengan Uni Soviet oleh Hatoyama Ichiro dan Kishi Nobusuke, berdasarkan Kepentingannya dengan China oleh Ishibashi Tanzan dan Tanaka Kakuei. Kemudian yang mendasarkan Kebijakannya pada Hukum dan Nuklir di Jepang adalah Hatoyama Ichiro dan Sato Eisaku, dan yang terakhir berdasarkan Kebijakan Ekonomi Jepang oleh Shidehara Kijuro, Yoshida Shigeru, Ikeda Hayato dan Sato Eisaku.

Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana Kebijakan para PM Jepang di atas, dapat dilihat di bawah ini:

#### A. Berdasarkan Kebijakannya dalam Militer dan Kedaulatan Negara:

##### 1. Pangeran Higashikuni Naruhiko (東久邇宮稔彦王)

Kebijakan dalam kabinetnya adalah :

- Untuk memastikan penertiban dari penghentian pertempuran dan demobilisasi angkatan bersenjata Jepang,
- Untuk memastikan kembali kepada rakyat bahwa lembaga kerajaan tetap aman.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Prime Minister of Japan and His Cabinet*  
<<http://www.kantei.go.jp>>

## 2. Shidehara Kijuro (幣原 喜重郎)

Shidehara turut serta dalam sebuah ketentuan Pasal 9 yang membatasi kedaulatan negara Jepang yang melarang Jepang untuk berperang. Shidehara pun mempunyai pernyataan yang terkenal. Pernyataan tersebut adalah *let us create a world without war (senso naki sekai) together with the world-humanity (sekai jinrui)*.<sup>47</sup>

### B. Berdasarkan Kepentingan yang Memihak Pada Amerika Serikat:

#### 1. Shidehara Kijuro.

Dikenal dengan reputasinya sebagai seorang yang pro AS, Shidehara ditunjuk menjadi PM kedua setelah PD II. Shidehara, menurut Jenderal Douglas MacArthur, adalah sosok yang pertama kali mengusulkan dimasukkannya Pasal 9 dalam Undang-Undang Jepang: Isi dari Pasal 9 tersebut adalah sebagai berikut:

#### *Constitution of Japan Preamble and Article 9*

#### **(Pembukaan Konstitusi Jepang dan Pasal 9)**

##### ***Preamble***

*We, the Japanese people, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the fruits and peaceful cooperation with all nations and the blessings of liberty throughout this land, and resolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action of government, do proclaim that sovereign power resides with the people and do firmly establish this constitution. Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people. This is a universal principle of mankind upon which this constitution is founded. We reject and revoke all constitutions, laws, ordinances, and rescripts in conflict herewith.*

<sup>47</sup> Shidehara Kijuro *Portraits of Modern Japanese Historical Figures*  
<<http://www.ndl.go.jp/portrait/e/datas/274.html>>

**(Pembukaan)**

(Kami, rakyat Jepang, yang sepatutnya dipilih melalui perwakilan kami di DIET Nasional, menetapkan bahwa kami akan mengamankan diri kami dan anak cucu kami hasil-hasil yang baik dan kerjasama damai dengan semua bangsa dan berkat kebebasan dari seluruh negeri ini, dan memutuskan tidak akan pernah lagi dikunjungi oleh ketakutan-ketakutan akan perang melalui tindakan pemerintah, yang menyatakan bahwa kekuatan kedaulatan berada pada rakyat dan yang bersungguh-sungguh mendirikan konstitusi ini. Pemerintah merupakan kepercayaan suci dari rakyat, wewenang berasal dari rakyat, kekuasaan dilakukan oleh perwakilan rakyat, dan manfaatnya dinikmati oleh rakyat. Ini ialah prinsip universal umat manusia dimana konstitusi ini didirikan. Kami menolak dan mencabut semua konstitusi, Undang-Undang, peraturan, dan naskah jika ada konflik bersama ini).

*We, the Japanese people, desire peace for all time and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship, and we have determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world. We desire to occupy an honored place in an international society striving for the preservation of peace, and the banishment of tyranny and slavery, oppression and intolerance for all time from the earth. We recognize that all peoples of the world have the right to live in peace, free from fear and want.*

(Kami, rakyat Jepang, menginginkan kedamaian sepanjang masa dan sangat sadar akan tingginya cita-cita mengendalikan hubungan manusia, dan kami telah bertekad untuk menjaga keamanan dan keberadaan kami, percaya pada keadilan dan keyakinan akan rakyat yang cinta damai di dunia. Kami ingin menempati tempat terhormat di dalam masyarakat internasional yang berusaha keras untuk menjaga perdamaian, dan memusnahkan tirani dan perbudakan, penindasan dan intoleransi untuk selamanya di dunia. Kami menyadari bahwa setiap orang di dunia memiliki hak untuk hidup dalam damai, bebas dari rasa takut dan keinginan).

*We believe that no nation is responsible to itself alone, but that laws of political morality are universal; and that obedience to such laws is incumbent upon all nations who would sustain their own sovereignty and justify their sovereign relationship with other nations.*

(Kami percaya bahwa tidak ada bangsa yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, tetapi hukum moralitas politik bersifat universal; dan ketaatan terhadap hukum seperti itulah kewajiban segala bangsa yang akan mempertahankan kedaulatan mereka sendiri dan membenarkan hubungan kedaulatan dengan bangsa lain).

*We, the Japanese people, pledge our national honor to accomplish these high ideals and purposes with all our resources.*

(Kami, rakyat Jepang, berjanji dengan kehormatan nasional kami untuk mencapai cita-cita dan tujuan dengan segala sumber daya kami).

#### *Article 9*

*Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.*

#### *(Pasal 9)*

(Terinspirasi oleh perdamaian dunia yang berdasarkan keadilan dan ketertiban, rakyat Jepang memandang perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai alat untuk alasan internasional).

*In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.<sup>48</sup>*

---

<sup>48</sup> Glenn D. Hook, Julie Gilson, Christopher W. Hughes, Hugo Dobson, *Japan's International Relations : Politics, Economics and Security*, Routledge, New York, 2005, hal. 558-559.

(Dalam rangka untuk mencapai tujuan dari paragraf sebelumnya, Angkatan Darat, Laut dan Udara, serta potensi perang lainnya, tidak akan dipertahankan. Hak untuk berperang tidak akan ditemukan lagi).

## 2. Yoshida Shigeru (吉田 茂)

Merupakan kandidat sempurna menjadi PM pada masa pendudukan sekutu pasca PD II karena idealisme pro AS dan pro Inggrisnya serta pengetahuannya akan masyarakat Barat. Kebijakannya yang terkenal yaitu *Yoshida Doctrine* membentuk kebijakan luar negeri Jepang pada masa era Perang Dingin dan seterusnya.

## 3. Kishi Nobusuke (岸 信介)

Kebijakan Luar Negerinya berinisiatif untuk membangun kembali hubungan keamanan dengan AS. Kishi juga membuat sebuah perjanjian baru yang tidak populer yaitu perjanjian kerjasama saling menguntungkan dengan AS. Isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

### *Treaty of Mutual Cooperation and Security*

**(Perjanjian Kerjasama Saling Menguntungkan dan Keamanan)**

***Between the United States and Japan (Antara AS dan Jepang)***

#### *Article I*

*The Parties undertake, as set forth in the Charter of the United Nations, full means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered and to refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations.*

#### **(Pasal 1)**

(Kedua pihak yang melakukan, seperti yang tercantum pada Piagam PBB, berarti secara penuh dengan cara perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam dan untuk menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari

ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan berpolitik dari setiap negara, atau dengan cara tidak konsisten lain dengan tujuan PBB).

*The Parties will endeavor in concert with other peace-loving countries to strengthen the United Nations so that its mission of maintaining international peace and security may be discharged more effectively.*

(Kedua pihak akan berusaha keras bersama dengan negara-negara cinta damai lainnya untuk memperkuat PBB sehingga misi untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional mungkin akan berhenti lebih efektif).

#### **Article II**

*The Parties will contribute toward the further development of peaceful and friendly international relations by strengthening their free institutions, by bringing about a better understanding of the principles upon which these institutions are founded, and by promoting conditions of stability and wellbeing. They seek to eliminate conflict in their international economic policies and encourage economic collaboration between them.*

#### **(Pasal 2)**

(Kedua pihak akan memberi kontribusi terhadap pengembangan lebih lanjut perdamaian dan hubungan internasional yang bersahabat oleh penguatan lembaga bebas mereka, dengan membawa pemahaman yang lebih baik atas prinsip-prinsip dimana lembaga ini didirikan, dan dengan mempromosikan kestabilan keadaan dan kesejahteraan. Mereka berusaha untuk menghapuskan konflik dalam kebijakan ekonomi dan mendorong kerjasama ekonomi di antara mereka).

#### **Article III**

*The Parties, individually and in cooperation with each other, by means of continuous and effective self-help and mutual aid will maintain and develop, subject to their constitutional provisions, their capacities to resist armed attack.*

**(Pasal 3)**

(Kedua pihak, secara individu dan bekerjasama satu sama lain, secara berlanjut dan swadaya yang efektif dan saling membantu akan terpelihara dan berkembang, sesuai dengan ketentuan konstitusional, kemampuan mereka untuk menahan serangan bersenjata).

**Article IV**

*The Parties will consult together from time to time regarding the implementation of this Treaty, whenever the security of Japan or international peace and security in the Far East is threatened.*

**(Pasal 4)**

(Kedua pihak akan berkonsultasi bersama dari waktu ke waktu mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kapan pun keamanan Jepang atau perdamaian dan keamanan internasional di Timur Jauh terancam).

**Article V**

*Each Party recognizes that an armed attack against either Party in the territories under the administration of Japan would be dangerous to its own peace and safety and declares that it would act to meet the common danger in accordance with its constitutional provisions and processes.*

**(Pasal 5)**

(Setiap pihak mengakui bahwa serangan bersenjata terhadap teritorial salah satu pihak di bawah administrasi Jepang akan membahayakan perdamaian dan keselamatannya sendiri dan menyatakan bahwa mereka akan bertindak terhadap bahaya tersebut sesuai dengan ketentuan dan proses konstitusional).

*Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall be immediately reported to the Security Council of the United Nations in accordance with the provisions of Article 51 of the Charter. Such measures shall be*

*terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security.*

(Setiap serangan bersenjata dan semua tindakan yang diambil sebagai hasil dari itu dapat segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB sesuai dengan ketentuan Piagam PBB Pasal 51. Tindakan seperti itu dapat dihentikan ketika DK PBB telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional).

#### *Article VI*

*For the purpose of contributing to the security of Japan and the maintenance of international peace and security in the Far East, the United States of America is granted the use by its land, air, and naval forces of facilities and areas in Japan.*

#### **(Pasal 6)**

(Untuk tujuan kontribusi terhadap keamanan Jepang dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional di Timur Jauh, AS diberikan fasilitas penggunaan daratan, udara, dan kekuatan pangkalan angkatan laut dan wilayah di Jepang).

*The use of these facilities and areas as well as the status of the United States armed forces in Japan shall be governed by a separate agreement, replacing the administrative Agreement under Article III of the Security Treaty between the United States of America and Japan, signed at Tokyo on February 28, 1952, as amended, and by such other arrangements as may be agreed upon.*

(Penggunaan fasilitas ini dan wilayah serta status angkatan bersenjata AS di Jepang akan diatur oleh perjanjian yang terpisah, menggantikan perjanjian administratif di bawah Pasal 3 dari Perjanjian Keamanan antara AS dan Jepang, ditandatangani di Tokyo, 28 Februari 1952, sebagaimana telah diubah, dan dari aturan lain yang dapat disetujui).

**Article VII**

*This Treaty does not affect and shall not be interpreted as affecting in any way the rights and obligations of the Parties under the Charter of the United Nations or the responsibility of the United Nations for the maintenance of international peace and security.*

**(Pasal 7)**

(Perjanjian ini tidak mempengaruhi dan tidak akan diinterpretasikan sebagai pengaruh di dalam hak dan kewajiban apapun caranya dari kedua pihak di bawah Piagam PBB atau tanggung jawab PBB untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional).

**Article VIII**

*This Treaty shall be ratified by the United States of America and Japan in accordance with their respective constitutional processes and will enter into force on the date on which the instruments of ratification thereof have been exchanged by them in Tokyo.*

**(Pasal 8)**

(Perjanjian ini akan diratifikasi oleh AS dan Jepang sesuai dengan proses konstitusional masing-masing dan akan masuk menjadi kekuatan pada tanggal dimana alat-alat ratifikasi itu telah ditukar oleh mereka di Tokyo).

**Article IX**

*The Security Treaty between the United States of America and Japan signed at the city of San Francisco on September 8, 1951, shall expire upon the entering into force of this Treaty.*

**(Pasal 9)**

(Perjanjian Keamanan antara AS dan Jepang ditandatangani di kota San Francisco pada tanggal 08 September 1951, akan berakhir ketika kekuatan masuk ke dalam perjanjian ini).

**Article X**

*This Treaty shall remain in force until in the opinion of the Governments of the United States of America and Japan there shall have come into force such United Nations arrangements as will satisfactorily provide for the maintenance of international peace and security in the Japan area.*<sup>49</sup>

**(Pasal 10)**

(Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai pada pendapat pemerintah AS dan Jepang akan mulai berlaku seperti aturan yang menyediakan kepuasan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional di wilayah Jepang).

**4. Tanaka Kakuei (田中 角榮)**

Kebijakan luar negerinya merupakan cerminan dari Kebijakan Richard Nixon. Tanaka banyak mengusulkan program investasi infrastruktur tapi tidak pernah terjadi karena memerlukan uang dalam jumlah besar melebihi apa yang dimiliki Jepang pada masa itu.<sup>50</sup>

**C. Berdasarkan Kebijakannya yang memperhatikan masalah Buruh di Jepang:****Ikeda Hayato (池田 勇人)**

Ikeda tercatat dalam resolusi beberapa sengketa buruh yang besar, termasuk mogoknya buruh yang telah berlangsung lama di Perusahaan Pertambangan Mitsui di Miike Mine.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Glenn D. Hook, Julie Gilson, Christopher W. Hughes, Hugo Dobson, *Japan's International Relations : Politics, Economics and Security*, Routledge, New York, 2005, hal. 563-565

<sup>50</sup> *Japan Today*.

<[http://www.empereur.com/DOC/Japan\\_Pol\\_Since\\_1954](http://www.empereur.com/DOC/Japan_Pol_Since_1954)>

<sup>51</sup> *Ibid*

#### D. Berdasarkan Kepentingannya dengan Uni Soviet:

##### 1. Hatoyama Ichiro (鳩山 一郎)

Pada periode kepemimpinannya sebagai PM, Jepang membangun kembali hubungan diplomatik Jepang dengan Uni Soviet.<sup>52</sup>

##### 2. Kishi Nobusuke.

Pada masa jabatannya, Kishi menandatangani perjanjian damai dengan Cekoslowakia dan Polandia. Selain itu, Jepang juga mulai bergabung bersama Dewan Keamanan PBB.<sup>53</sup>

#### E. Berdasarkan Kepentingannya dengan China:

##### 1. Ishibashi Tanzan (石橋 湛山)

Ishibashi menyatakan pemerintah Jepang harus berusaha untuk menetapkan hubungan diplomatik dengan China, dan kebijakannya ini populer di kalangan masyarakat.<sup>54</sup>

##### 2. Tanaka Kakuei.

Pencapaian Tanaka yang paling diingat adalah normalisasi hubungan Jepang dengan RRC. Adapun beberapa poin penting yang dicapai di Peking, 29 September 1972 adalah sebagai berikut:

1. *The abnormal state of affairs that has hitherto existed between Japan and the People's Republic of China is terminated on the date on which this Joint Communique is issued.*

(Hubungan yang tidak normal yang masih ada hingga sekarang antara Jepang dan China diakhiri pada tanggal ketika komunike bersama ini resmi dikeluarkan).

2. *The Government of Japan recognizes that Government of the People's Republic of China as the sole legal Government of China.*

<sup>52</sup> *Prime Minister of Japan and His Cabinet.*  
<<http://www.kantei.go.jp>>

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*

(Pemerintah Jepang mengakui bahwa pemerintah China sebagai satu-satunya pemerintahan China yang syah menurut hukum).

3. *The Government of the People's Republic of China reiterates that Taiwan is an inalienable part of the territory of the People's Republic of China. The Government of Japan fully understands and respects this stand of the Government of the People's Republic of China, and it firmly maintains its stand under Article 8 of the Postdam Proclamation.*

(Pemerintah China mengulangi pernyataannya bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah China. Pemerintah Jepang sepenuhnya memahami dan menghormati pernyataan dari pemerintah China ini, dan memeliharanya dengan sungguh-sungguh apa yang tertera di bawah Pasal 8 Proklamasi Postdam).

4. *The Government of Japan and the Government of People's Republic of China have decided to establish diplomatic relations as from September 29, 1972. The two Governments have decided to take all necessary measures for the establishment and the performance of the functions of each other's embassy in their respective capitals in accordance with international law and practice, and to exchange ambassadors as speedily as possible.*

(Pemerintah Jepang dan pemerintah China telah memutuskan untuk menjalin diplomatik sejak 29 September 1972. Kedua pemerintah telah memutuskan untuk mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan untuk pembentukan dan kinerja fungsi dari masing-masing kedutaan besar di ibukota masing-masing sesuai dengan hukum internasional dan prakteknya, dan untuk bertukar duta besar secepat mungkin.

5. *The Government of the People's Republic of China declares that in the interest of the friendship between the Chinese and the Japanese peoples, it renounces its demand for war reparation from Japan.*

(Pemerintah China menyatakan kepentingan dari persahabatan antara China dan bangsa Jepang, telah meninggalkan permintaannya terhadap pampasan perang dari Jepang).

6. *The Government of Japan and the Government of the People's Republic of China agree to establish relations of perpetual peace and friendship between the*

*two countries on the basis of the principles of mutual respect for sovereignty and territorial integrity, mutual non-aggression, non-interference in each other's internal affairs, equality and mutual benefit and peaceful coexistence.*

(Pemerintah Jepang dan pemerintah China setuju untuk membangun hubungan yang damai dan bersahabat terus-menerus antara kedua negara yang berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, saling non-agresi, saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, kesetaraan dan saling menguntungkan dan hidup damai berdampingan).

*The two Governments confirm that, in conformity with the foregoing principles and the principles of the Charter of the United Nations, Japan and China shall in their mutual relations settle all disputes by peaceful means and shall refrain from the use or threat of force.*

(Kedua pemerintah telah mengkonfirmasi, sesuai dengan prinsip-prinsip sebelumnya dan prinsip dari Piagam PBB, Jepang dan China akan bersama dalam menyelesaikan segala perselisihan dengan damai dan harus menahan diri dari penggunaan atau ancaman kekuatan).

7. *The normalization of relations between Japan and China is not directed against any third country. Neither of the two countries should seek hegemony in the Asia-Pacific region and each is opposed to efforts by any other country or group of countries to establish such hegemony.*

(Normalisasi hubungan antara Jepang dan China tidak ditujukan terhadap negara ketiga. Baik dari kedua negara harus mencari hegemoni di kawasan Asia Pasifik dan masing-masing bertentangan dengan upaya oleh negara lain atau sekelompok negara untuk mendirikan sebuah hegemoni).

8. *The Government of Japan and the Government of the People's Republic of China have agreed that, with a view to solidifying and developing the relations of peace and friendship between the two countries, the two Governments will enter into negotiations for the purpose of concluding a treaty of peace and friendship.*

(Pemerintah Jepang dan pemerintah China telah setuju, memperkuat pandangan dan mengembangkan hubungan yang damai dan bersahabat antara kedua negara,

kedua pemerintah akan masuk ke dalam negosiasi yang bertujuan untuk menandatangani perjanjian perdamaian dan persahabatan).

9. *The Government of Japan and the Government of the People's Republic of China have agreed that, with a view to further promoting relations between the two countries and to expanding interchanges of people, the two Governments will, as necessary and taking account of the existing non-governmental arrangements, enter into negotiations for the purpose of concluding agreements concerning such matters as trade, shipping, aviation, and fisheries.*<sup>55</sup>

(Pemerintah Jepang dan pemerintah China telah setuju, dengan maksud untuk lebih meningkatkan hubungan antara kedua negara dan untuk memperbanyak pertukaran orang-orang, kedua pemerintah akan, dan bila diperlukan mengambil alih akun yang tidak berdasarkan peraturan non-pemerintah, masuk dalam negosiasi yang bertujuan untuk menandatangani kesepakatan mengenai hal-hal seperti perdagangan, perkapalan, penerbangan dan perikanan).

## **F. Berdasarkan Kebijakan Hukum dan Nuklir di Jepang:**

### **1. Hatoyama Ichiro.**

Hatoyama memberikan pembebasan bersyarat kepada para penjahat perang kelas A yang telah dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Tokyo.<sup>56</sup>

### **2. Sato Eisaku (佐藤 榮作)**

Memperkenalkan 3 prinsip non-nuklir pada 11 Desember 1967 yaitu tidak memproduksi, tidak memiliki dan tidak mengenal senjata nuklir. Kemudian Sato mengubahnya menjadi 4 pilar Kebijakan Nuklir. Sato juga membuat Jepang bergabung dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Glenn D. Hook, Julie Gilson, Christopher W. Hughes, Hugo Dobson, *Japan's International Relations : Politics, Economics and Security*, Routledge, New York, 2005, hal. 573-575.

<sup>56</sup> *Prime Minister of Japan and His Cabinet*.

<<http://www.kantei.go.jp>>

<sup>57</sup> *Ibid*

## G. Berdasarkan Kebijakan Ekonomi Jepang:

### 1. Shidehara Kijuro.

Kebijakan ekonomi konservatif dan hubungan keluarga dengan kepentingan Mitsubihhi membuatnya tidak populer di kalangan gerakan kiri.<sup>58</sup>

### 2. Yoshida Shigeru.

Kebijakannya yang populer dikenal dengan *Yoshida Doctrine*, yaitu menekankan pada perbaikan ekonomi Jepang dan menggantungkan perlindungan pada militer AS.

### 3. Ikeda Hayato.

Mengusulkan rencana pendapatan berlipat dan politik kesabaran dan rekonsiliasi, dengan menekankan pada perkembangan ekonomi Jepang sambil meminimalkan konflik sosial. Bahkan oleh Nakamura Takafusa, Ikeda disebut sebagai sosok paling penting dalam pesatnya pertumbuhan ekonomi Jepang.<sup>59</sup>

### 4. Sato Eisaku.

Merupakan PM populer mengingat akan pertumbuhan ekonomi, kebijakan luar negerinya yang menyeimbangkan tindakan secara halus antara kepentingan AS dan China. Sato juga ikut serta dalam penciptaan *Asian Development Bank* pada 1966 dan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri pada *Southeast Asian Economic Development*.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> *Shidehara Kijuro Portraits of Modern Japanese Historical Figures*

<<http://www.ndl.go.jp/portrait/e/datas/274.html>>

<sup>59</sup> *Prime Minister of Japan and His Cabinet*

<<http://www.kantei.go.jp>>

<sup>60</sup> *Ibid*

**BAB IV**  
**PERUBAHAN KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI JEPANG**  
**DI ASEAN**

**4.1. Perdana Menteri yang Berperan Penting**

Untuk lebih jelas bagaimana hubungan Jepang dan Asia Tenggara maka akan dibahas lebih lanjut tentang PM Jepang yang berperan penting di kawasan Asia Tenggara dan Kebijakannya. Mereka adalah sebagai berikut :

**1. Yoshida Shigeru**

Yoshida Shigeru memiliki Kebijakan yang populer yaitu *Yoshida Doctrine* yang menekankan pada perbaikan ekonomi Jepang dan menggantungkan perlindungan pada militer AS. Artinya menempatkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas tertinggi kepentingan nasional. Bahkan Yoshida mengeluarkan pernyataan, bahwa "*Beraliansi dengan AS merupakan kunci dasar bagi Jepang melakukan rekonstruksi keadaan ekonomi dan merupakan tonggak utama dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri.*"<sup>61</sup>

Yoshida Shigeru dalam pidatonya pada November 1952 menyatakan secara resmi kebijakannya terhadap negara-negara kawasan Asia Tenggara. Berikut adalah pidatonya:

*"With respect to trade promotion, the government shall carry out economic diplomacy, i.e., conclusion of commercial treaties, broaden and develop trade opportunities by increasing overseas merchant ships, strengthening export industries, and utilizing foreign currency reserves. In so doing, we will particularly develop economic linkages with Southeast Asian countries."*<sup>62</sup>

(Bersama dengan hal untuk menaikkan perdagangan, pemerintah akan melaksanakan diplomasi ekonomi, yaitu menentukan perjanjian-perjanjian yang

---

<sup>61</sup> Abdul Irsan, *Budaya & Perilaku Politik Jepang di Asia*, Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2007, hal. 71.

<sup>62</sup> Sueo Sudo, *The Fukuda Doctrine and ASEAN: New Dimensions in Japanese Foreign Policy*, Institute of Southeast Asian Studies, hal. 40.

bersifat komersial, menambah jumlah pemilik kapal-kapal di luar negeri, memperkuat industri ekspor, dan memanfaatkan cadangan mata uang asing. Dengan melakukan itu, kami (Jepang) akan terutama mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara-negara Asia Tenggara).

Dari pidato tersebut menghasilkan persetujuan dari pertemuan Kabinet terhadap kebijakan luar negeri baru Jepang. Persetujuan tersebut menekankan pada 3 prinsip, yaitu:

1. Bekerjasama dengan negara-negara Demokratis.
2. Bekerjasama dengan PBB.
3. Normalisasi dan mempromosikan hubungan persahabatan dengan negara-negara Asia Tenggara.<sup>63</sup>

## 2. Kishi Nobusuke

Walaupun tidak banyak yang dilakukan oleh Kishi Nobusuke untuk ASEAN tetapi Kishi Nobusuke turut berperan dalam membayar biaya perbaikan ke Indonesia. Kishi Nobusuke juga merupakan PM Jepang pertama yang berkunjung ke Asia Tenggara. Pada tahun 1956, Jepang melalui PM Kishi Nobusuke mulai mendekati Indonesia karena sumber alamnya. Jepang mulai melakukan pembicaraan dengan Indonesia tentang masalah pampasan perang. Di tahun yang sama perusahaan minyak Jepang memperoleh konsesi minyak untuk pertama kalinya di Indonesia walaupun banyak kendala.<sup>64</sup>

## 3. Sato Eisaku

Selain berpengaruh di dalam negerinya Jepang, Sato Eisaku juga berpengaruh di luar Jepang khususnya ASEAN. Sato Eisaku turut serta dalam penciptaan ADB dan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri pada *Southeast Asian*

<sup>63</sup> Ibid, hal. 71.

<sup>64</sup> *List of Prime Ministers.*

<[http://www.kantei.go.jp/Foreign/cabinet/58\\_e.html](http://www.kantei.go.jp/Foreign/cabinet/58_e.html)>

*Economic Development*. Sato Eisaku juga merupakan PM Jepang pertama yang berkunjung ke Singapura.<sup>65</sup>

#### 4. Tanaka Kakuei

Merupakan PM dengan tingkat popularitas tinggi di dalam sejarah Jepang. Pada saat menjabat sebagai PM, Ekonomi dan perdagangan Internasional Jepang mengalami peningkatan yang luar biasa. Adanya anggapan dari negara-negara Barat bahwa Jepang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan situasi politik dunia. Akibatnya di beberapa negara Asia Tenggara muncul anggapan bahwa Jepang telah melakukan *economy colonized* atau *economic animal*. Puncaknya adalah terjadi peristiwa Tragedi Malari di Indonesia dan pada saat yang sama juga banyak bermunculan gelombang protes gerakan anti Jepang di beberapa negara Asia Tenggara.

Kedua gambar berikut ini akan menjelaskan bagaimana keadaan pada saat terjadinya Tragedi Malari di Indonesia. Gambar pertama terdapat gambar sebuah mobil yang terbalik dan terbakar dengan asap mengepul di sekitarnya. Sedangkan gambar berikutnya merupakan kerumunan massa yang berada di tempat kejadian baik yang sedang mendekati maupun yang hanya menyaksikan dari jauh.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

Gambar 5. Peristiwa Malari<sup>66</sup>



Gambar 6. Peristiwa Malari

([http://www.tempointeractive.com/hg/photostock/2004/12/17/s\\_Malari57.jpg](http://www.tempointeractive.com/hg/photostock/2004/12/17/s_Malari57.jpg))



---

<sup>66</sup> Glenn D. Hook, Julie Gilson, Christopher W. Hughes, Hugo Dobson, *Japan's International Relations : Politics, Economics and Security*, Routledge, New York, 2005, hal. 221

Tragedi Malari terjadi bertepatan dengan kunjungan Tanaka Kakuei ke Indonesia pada 15 Januari 1974.<sup>67</sup> Peristiwa itu terjadi ketika mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Karena penjagaan yang ketat, para mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Pada saat itu, suasana kota Jakarta mencekam karena banyaknya terjadi kekerasan. Terbukti dengan tercatat sedikitnya 11 orang meninggal, 300 luka-luka dan 775 orang ditahan. Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak dan dibakar, serta 144 bangunan rusak. Selain itu, sebanyak 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan.<sup>68</sup> Selain Malari di Indonesia, demonstrasi anti Jepang juga terjadi di Thailand. Sebelumnya di Thailand pada tahun 1972 telah dilakukan boikot terhadap barang-barang produksi dari Jepang dan di Malaysia banyak masyarakat yang menyatakan komplainnya terhadap produksi Jepang dan mengeksport barang-barang palsu.<sup>69</sup>

Huru-hara yang menyambut kedatangan PM Tanaka di Asia Tenggara dianggap sebagai kurang dilakukannya pendekatan oleh Jepang pasca PD II. Selain itu bagi ASEAN hal itu juga dikarenakan timbulnya ketakutan bahwa adanya dominasi di bidang Ekonomi yang dilakukan oleh Jepang.

---

<sup>67</sup> Tanaka Akihiko, *ASEAN-Japan Cooperation : ASEAN-Japan Ties: A Basis for Cooperation*, Japan Center for International Exchange, Tokyo, 2003, hal. 21

<sup>68</sup> Adam, Asvi Warman, *Malari 1974 dan Sisi Gelao Sejarah*, 16 Januari 2003.  
<http://www.kompas.com>

<sup>69</sup> Narongchai Akrasanee dan Apichart Prasert, *ASEAN-Japan Cooperation : The Evolution of ASEAN-Japan Economic Cooperation*, Japan Center for International Exchange, Tokyo, 2003, hal. 66

## 4.2. Fukuda Takeo dan Kebijakan Luar Negeri Setelah 1970-an

### 4.2.1. Fukuda Takeo, Riwayat dan Kariernya

Gambar 7. Fukuda Takeo

(sumber dari <http://www.kantei.go.jp/foreign/cabinet/images/souri67.jpg>)

福田 赳夫

(第67代)





明治38年1月14日生  
平成7年7月5日死去(66歳)  
出生地：群馬

Fukuda Takeo lahir di Prefektur Gunma, Jepang pada 14 Januari 1905. Fukuda berasal dari keluarga mantan Samurai. Ayahnya adalah seorang walikota pada masanya di daerah pegunungan di pusat Honshu. Ia menyelesaikan pendidikannya di Universitas Tokyo belajar tentang Birokrasi di Fakultas Hukum. Pada usia 25 tahun ia memulai kariernya dengan bergabung di Departemen Keuangan. Karier politiknya dimulai pada tahun 1952, berawal ketika ia terpilih dalam *House of Representatives* mewakili distrik Gunma.

Fukuda telah meninggal dunia pada 5 Juli 1995. Ia meninggalkan seorang istri, 3 orang putera, 1 orang puteri, dan banyak cucu. Putera tertuanya, Fukuda Yasuo menjadi PM Jepang menggantikan Shinzo Abe yang mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 2007.

Perjalanan karier Fukuda sebelum menjadi Perdana Menteri Jepang adalah sebagai Deputi Perdana Menteri Jepang sejak 1974 – 1976.

Untuk lebih lengkapnya, akan dijelaskan sebagai berikut:

- Departemen Keuangan 1929 – 1950.
- Deputy Wakil Menteri Keuangan 1945 – 1946.
- Direktur Biro Perbankan 1946 – 1947.
- Direktur Biro Anggaran 1947 – 1950.
- Anggota *House of Representative* 1952 – 1995.
- Menteri Keuangan 1965 – 1966.
- Sekretaris Jenderal dan Presiden, Partai Demokrat Liberal 1966 – 1968.
- Menteri Keuangan 1968 – 1971.
- Menteri Keuangan 1973 – 1974.
- Menteri Luar Negeri 1971 – 1972.
- Deputy Perdana Menteri 1974 – 1976.<sup>70</sup>

Fukuda adalah seorang politisi handal Jepang dan merupakan Perdana Menteri Jepang yang ke-67 terhitung dari 24 Desember 1976 hingga 7 Desember 1978. Sebelumnya Fukuda juga menjadi kandidat Perdana Menteri Jepang pada 1972 tetapi kalah dari Tanaka Kakuei yang akhirnya menjadi Perdana Menteri Jepang ke 65.

Kariernya di DIET dimulai pada tahun 1952 dan dengan cepat menjadi rekan sejawat dari Kishi Nobusuke yang merupakan PM Jepang periode 1957-1960. Kemudian posisi Fukuda meningkat naik menjadi senior di LDP dan menjadi Menteri Pertanian pada tahun 1957. Pada masa pemerintahan PM Ikeda Hayato (1960-1964), Fukuda dengan lugas menyuarakan perselisihan di LDP. Fukuda mengkritik Kebijakan Ekonomi pemerintah karena efek dari inflasi.

Kemudian Fukuda mendukung pemilihan Sato Eisaku sebagai PM (1964-1972) dan oleh karenanya Fukuda diganjar dengan pengangkatan dirinya sebagai Menteri Keuangan pada 1965. Fukuda diangkat lagi menjadi Menteri Keuangan pada masa jabatan Tanaka Kakuei (1972-1974) pada 1973, dan ia

---

<sup>70</sup> Murray Sayle, *Obituary: Takeo Fukuda*, 08 Juli 1995.  
<http://www.independent.co.uk/news/people/obituary-takeo-fukuda-1590409.html>

bertanggungjawab pada usaha pembangunan pemerintah untuk mengontrol inflasi terhadap guncangan harga minyak dunia.

Pada proses kemenangannya menjadi Perdana Menteri Jepang, walaupun awalnya LDP menunjukkan prestasi yang tidak memuaskan pada pemilihan umum tahun 1976 tetapi mendapatkan dukungan dari partai-partai minoritas yang akhirnya memperoleh suara mayoritas dari Parlemen. Akhirnya Fukuda mengambil alih jabatan Perdana Menteri dari Miki Takeo.

#### 4.2.2. Kebijakan Fukuda Takeo

Setelah menjabat menjadi PM, Fukuda Takeo mengeluarkan sebuah pedoman dalam pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri terhadap negara-negara ASEAN. Pedoman tersebut adalah Diplomasi dari hati ke hati atau lebih dikenal dengan istilah *Heart to Heart Diplomacy*. *Heart to Heart Diplomacy* dirumuskan dalam sebuah Doktrin yaitu *Fukuda Doctrine*. Bersamaan dengan kunjungannya ke sejumlah negara di Asia Tenggara, PM Fukuda mengumumkan Doktrin Fukuda dalam pidatonya di Manila, Filipina pada tanggal 18 Agustus 1977.<sup>71</sup> Salah satu pencapaiannya ketika menjabat sebagai PM adalah negosiasi penyelesaian perdamaian antara China dan Jepang.

#### 4.2.3. Doktrin Fukuda

Doktrin Fukuda adalah 3 prinsip Diplomasi Politik Jepang kepada negara-negara ASEAN. Inti dari Doktrin Fukuda itu adalah sebagai berikut:

*First, Japan, a nation committed to peace, rejects the role of military power and on that basis is resolved to contribute to the peace and prosperity of Southeast Asia and the world community.*

(Pertama, Jepang, negara yang berkomitmen untuk perdamaian, menolak peran militer yang berkuasa dan berdasarkan itu memutuskan untuk berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran Asia Tenggara dan komunitas dunia).

<sup>71</sup> Glenn D. Hook, Julie Gilson, Christopher W. Hughes, Hugo Dobson, *Japan's International Relations : Politics, Economics and Security*, Routledge, New York, 2005, hal. 469

*Second, Japan, as a true friend of the countries of Southeast Asia, will do its best for consolidating the relationship of mutual confidence and trust based on "heart-to-heart" understanding with these countries –in wide- ranging fields covering not only political and economic areas but also social and cultural areas.*

(Kedua, Jepang, sebagai teman sejati dari negara-negara Asia Tenggara, akan melakukan yang terbaik untuk menggabungkan hubungan yang saling percaya dan kepercayaan berdasarkan pemahaman "dari hati ke hati" dengan negara-negara Asia Tenggara dalam banyak hal tidak hanya di bidang politik dan ekonomi tetapi juga di bidang sosial dan budaya).

*Third, Japan will be an equal partner of ASEAN and its member countries, and cooperate positively with them in their efforts to strengthen their solidarity and resilience, together with other nations of the like mind outside the region, while aiming at fostering a relationship based on mutual understanding with the nations of Indochina, and will thus contribute to the building of peace and prosperity throughout Southeast Asia.<sup>72</sup>*

(Ketiga, Jepang akan menjadi mitra sejajar ASEAN dan negara-negara anggotanya, dan bekerjasama secara positif dengan mereka dalam upaya untuk memperkuat solidaritas dan ketahanan, bersama dengan negara lain yang memiliki ide dan kepentingan yang sama di luar kawasan Asia Tenggara, sementara yang bertujuan membantu perkembangan hubungan berdasarkan saling pengertian dengan negara-negara Indo China, dan dengan demikian akan memberikan kontribusi untuk pembangunan perdamaian dan kemakmuran di seluruh Asia Tenggara).

Sebelum pidato yang dikenal dengan Doktrin Fukuda ini terjadi, Fukuda Takeo telah mengunjungi beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dimulai pada 6 Agustus 1977.<sup>73</sup> Fukuda pun melakukan pertemuan dengan para pemimpin negara Asia Tenggara. Bahkan Fukuda merespon positif permintaan bantuan

<sup>72</sup> Tanaka Akihiko, *ASEAN-Japan Cooperation : ASEAN-Japan Ties: A Basis for Cooperation*, Japan Center for International Exchange, Tokyo, 2003, hal. 22

<sup>73</sup> Glenn D. Hook, Julie Gilson, Christopher W. Hughes, Hugo Dobson, *Japan's International Relations : Politics, Economics and Security*, Routledge, New York, 2005, hal. 469

ASEAN sebesar US\$ 1 Miliar. Jepang juga menjanjikan akan menggandakan ODA dalam 5 tahun ke depan.<sup>74</sup>

Bersamaan kunjungannya ke Manila Fukuda juga mengunjungi 4 negara ASEAN lainnya (Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura) dan Burma. Selanjutnya pada Juni 1978, Menteri Luar Negeri Jepang Sonoda Sunao, menghadiri pertemuan dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN pada ASEAN *Ministerial Meeting* (AMM). Jepang memberikan kontribusi sebesar 5 Miliar Yen guna pertukaran budaya.<sup>75</sup>

Hal di atas itulah yang menjadi awal pelaksanaan dari Doktrin Fukuda yang dicanangkan PM Fukuda Takeo yang akhirnya menjadi bentuk Diplomasi baru Jepang dengan ASEAN.

Setelah lahirnya Doktrin Fukuda, secara langsung akan mengubah Diplomasi Jepang yang selama ini dikenal memiliki Diplomasi Ekonomi dan Teknologi. Sebuah Diplomasi Ekonomi lama yang dalam perkembangannya dianggap egois oleh negara-negara di dunia internasional baik itu di Eropa dan Asia. Diplomasi yang menimbulkan anggapan negara raksasa ekonomi yang kemudian berkembang menjadi gerakan anti Jepang.

Akhirnya Jepang memiliki sebuah bentuk Diplomasi Baru yang berdasarkan dari hati ke hati atau *Heart to Heart Diplomacy*. Adapun yang menjadi esensi politik dari Doktrin Fukuda tercermin pada poin ketiga, yaitu *Japan would cooperate with ASEAN's efforts to strengthen solidarity and resilience, nurture relations of mutual understanding with the Indochinese states, and thus world contribute to the peace and prosperity of the entire Southeast Asia region.*<sup>76</sup> Bahwa Jepang akan menjadi jembatan antara ASEAN dan Indocina untuk perdamaian dan kesejahteraan seluruh asia tenggara sebagai mitra seajar.

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hal. 22

<sup>75</sup> *Ibid*, hal. 22

<sup>76</sup> Soeya Yoshihide, *ASEAN-Japan Cooperation : Japan as a Regional Actor*, Japan Center for International Exchange, Tokyo, 2003, hal. 55

### 4.3. Perubahan Strategis Kebijakan Luar Negeri

Apa yang dilakukan Jepang di atas sesuai dengan definisi resolusi konflik yang diungkapkan oleh Peter Wallensteen. Menurut Wallensteen definisi resolusi konflik mengandung 3 unsur penting.<sup>77</sup> Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Adanya kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagi semua pihak. Dalam hal ini ditandai dengan pendeklarasian Doktrin Fukuda oleh PM Fukuda pada Agustus 1977.
2. Setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subyek. Sikap ini sangat penting karena tanpa itu mereka tidak bisa bekerjasama selanjutnya untuk menyelesaikan konflik secara tuntas. Unsur yang kedua ini sesuai dengan salah satu esensi dari Doktrin Fukuda yaitu Jepang akan bekerjasama secara positif dengan seluruh negara anggota ASEAN sebagai mitra seajar.
3. Pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan sehingga pembangunan rasa saling percaya bisa berjalan sebagai landasan untuk transformasi, ekonomi dan politik yang didambakan. Unsur ketiga ini juga dapat dilihat kesesuaiannya dengan esensi Doktrin Fukuda lainnya bahwa Jepang akan menjalin hubungan dengan rasa saling pengertian dan rasa saling percaya terhadap negara-negara Asia Tenggara.

Sejak adanya Doktrin Fukuda, saat itulah dimulai sebuah pendekatan baru terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pendekatan tersebut lebih mengutamakan kedamaian hubungan baik bagi kedua belah pihak. Salah satunya adalah di bidang Kebudayaan yaitu yang dinamakan dengan Diplomasi Kebudayaan.

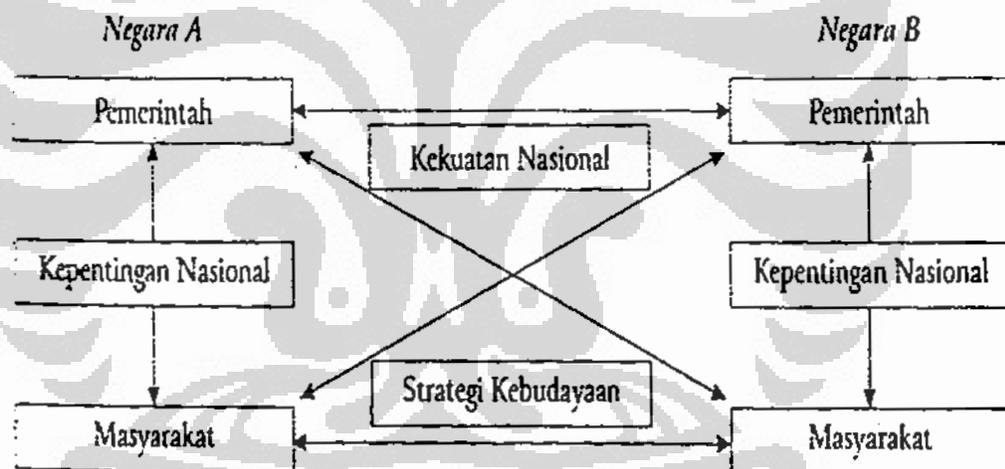
Setelah Doktrin Fukuda dimunculkan, Jepang menggabungkan antara Diplomasi Ekonomi dan berbagai Diplomasi lainnya dengan cara damai termasuk

---

<sup>77</sup> Yulius Hermawan, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan Metodologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hal. 93.

Diplomasi Kebudayaan. Diplomasi Kebudayaan adalah usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga dan kesenian, atau pun secara makro, yaitu bukan politik, ekonomi atau militer. Adapun tujuan dari Diplomasi Kebudayaan adalah untuk mempengaruhi pendapat umum dalam hal ini adalah pendapat dari masyarakat negara-negara ASEAN guna mendukung suatu kebijaksanaan politik luar negeri Jepang.<sup>78</sup> Hal ini dimaksudkan agar pendapat tersebut kemudian mempengaruhi para petinggi negara-negara ASEAN untuk mengambil keputusan pemerintah dan menentukan sikapnya terhadap Jepang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Skema yang digambarkan berikut mengenai Pelaku dan Sasaran Diplomasi Kebudayaan:

Tabel 7. Skema Pelaku dan Sasaran Diplomasi Kebudayaan<sup>79</sup>



Diplomasi Kebudayaan dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, dan sasaran utamanya adalah masyarakat suatu negara atau bangsa. Artinya Jepang atau lembaga non-pemerintahnya mempengaruhi masyarakat negara-negara ASEAN melalui strategi kebudayaan baik itu dari pertunjukkan seni ataupun budaya populer. Mempengaruhi masyarakat dengan maksud agar

<sup>78</sup> Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2007, hal. 4.

<sup>79</sup> Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2007, hal. 17.

pemerintahnya dapat membuat keputusan dan mengambil sikap terhadap Kepentingan Nasional Jepang.

Selain melalui Diplomasi Kebudayaan, Jepang juga menggunakan pendekatan di bidang Pariwisata. Diplomasi Kebudayaan yang dilakukan Jepang telah berhasil memperkenalkan budaya dan kehidupan masyarakat Jepang ke negara lain. Adapun tujuan dari Diplomasi Kebudayaan adalah untuk mempengaruhi pendapat umum dalam hal ini adalah pendapat dari masyarakat negara-negara ASEAN guna mendukung suatu kebijaksanaan politik luar negeri Jepang.

#### **4.3.1. Kondisi di Negara-negara ASEAN**

Setelah Perang Dunia II berakhir, tentunya banyak menyisakan penderitaan bagi para korbannya. Tidak hanya bagi negara yang ikut perang tetapi juga bagi negara-negara lainnya di dunia. Terutama bagi negara berkembang atau negara dunia ke-3. Begitu juga dengan negara-negara di kawasan Asia yang menjadi korban pendudukan Jepang. Jepang yang selama perang berlangsung menginginkan untuk menjadi penguasa Asia, memberikan penderitaan perang bagi negara Asia lainnya. Termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN.

Jepang yang mengalami kekalahan dalam perang kemudian berjanji untuk tidak lagi memiliki kekuatan militer. Janji inilah yang menjadi dasar bagi Jepang untuk kembali berhubungan dengan negara-negara ASEAN. Tepatnya pada tahun 1952 di bawah Perjanjian Damai San Francisco, Jepang mengadakan persetujuan untuk membayar biaya perbaikan perang bagi negara-negara ASEAN. Walaupun masih banyak terdapat gerakan anti Jepang di ASEAN, Jepang berhasil merealisasikan persetujuan tersebut. Terbukti dengan adanya beberapa negara yang bersedia seperti Myanmar pada November 1954, Filipina pada April 1954,

Indonesia pada Januari 1958 dan Vietnam Selatan pada Mei 1959.<sup>80</sup> Menyusul kemudian negara-negara ASEAN lainnya.

Seiring waktu Jepang mulai masuk dan memperkuat perekonomiannya di Asia Tenggara. Semakin kuatnya ekonomi Jepang melalui industrinya baik itu tekstil, pembuatan kapal, baja dan kimia (1950-1960) maupun elektronik dan mobil (1970-1980).<sup>81</sup> Ekonomi yang semakin berkembang kuat melahirkan masalah baru bagi Jepang. Pemusatan pada bidang ekonomi dan perdagangan internasional serta sikap tidak mau peduli dengan situasi politik dunia internasional menjadi sebuah tuduhan bahwa Jepang telah melakukan *Economy Colonized* dan menjadi Raksasa Ekonomi dunia.

Anggapan di atas juga muncul di beberapa negara Asia Tenggara atau ASEAN. Beberapa negara ASEAN juga menuduh Jepang telah melakukan penguasaan ekonomi di negara dan kawasan mereka. Lebih lanjut, di Malaysia, kekecewaan masyarakatnya diwujudkan dengan semakin banyaknya komplain terhadap produksi Jepang dan menuduh Jepang telah mengekspor barang-barang palsu. Sementara di Thailand terjadi pemboikotan terhadap barang-barang produksi dari Jepang. Akhirnya muncul gerakan anti Jepang dan semakin meluas di Asia Tenggara dan puncaknya di Indonesia juga terjadi suatu peristiwa yang dinamakan Malari. Peristiwa Malari dan demonstrasi gerakan anti Jepang di Asia Tenggara inilah yang kemudian menjadi awal pendorong dari dilakukannya perubahan strategis politik luar negeri di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN oleh Jepang.

#### 4.3.2. Perubahan Strategis yang dilakukan

Setelah Tragedi Malari dan demonstrasi gerakan anti Jepang terjadi, Jepang mulai berusaha untuk memperbaiki keadaan. Citranya yang memburuk di Asia Tenggara dengan sebutan *economic animal* berusaha Jepang ubah. Jepang mulai melakukan berbagai hal yang akan dapat memulihkan hubungan antara Jepang dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

<sup>80</sup> Glenn D. Hook, Julie Gilson, Christopher W. Hughes, Hugo Dobson, *Japan's International Relations : Politics, Economics and Security*, Routledge, New York, 2005, hal. 218.

<sup>81</sup> *Ibid*, hal. 236.

Berbagai cara telah dilakukan Jepang untuk memperbaiki keadaannya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Diawali dengan mengadakan pergantian PMnya, dari Tanaka Kakuei ke Miki Takeo yang menjabat dari 9 September 1974 hingga 24 Desember 1976. Sampai akhirnya Miki Takeo akhirnya digantikan dan dilanjutkan oleh Fukuda Takeo.

Pada saat kepemimpinan Fukudalah Jepang kemudian menemukan sebuah rumusan baru tentang Kebijakan Luar Negeri dan bentuk Diplomasi Baru terhadap ASEAN. Bertepatan dengan menjabatnya Fukuda Takeo sebagai PM Jepang mengawali perubahan strategis politik luar negeri di akhir 1970-an. Fukuda Takeo mempersiapkan strategis khusus guna menjalin hubungan baiknya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. PM Fukuda melengkapi Diplomasi Jepang dengan merumuskan sebuah Diplomasi baru bagi Jepang yaitu Doktrin Fukuda.

Meskipun tidak mudah tetapi semenjak adanya Doktrin Fukuda, hubungan dan kerjasama yang terjalin antara ASEAN dan Jepang mengalami perkembangan dan meningkat pesat. Kedua belah pihak mendasari hubungan mereka dengan rasa saling pengertian dan saling menghormati akan adanya perbedaan. Terutama jika terkait dengan perbedaan Budaya, Politik dan Ekonomi di antara keduanya.

Setelah perubahan strategis yang menyangkut kebijakan politik luar negeri dilakukan oleh Jepang terhadap negara ASEAN tentunya ada pengaruhnya. Pengaruh tersebut tidak hanya di dalam negeri Jepang tetapi pastinya juga di ASEAN. Berikut ini akan dijelaskan pengaruhnya di berbagai bidang, yaitu :

#### **A. Bidang Perdagangan**

Semenjak Jepang mulai menerapkan Doktrin Fukuda dalam Diplomasi Barunya, angka Perdagangan Jepang ke negara-negara ASEAN meningkat tajam. Sangat terlihat jumlah peningkatan ekspor pada masa pasca PD II dan setelah adanya Doktrin Fukuda. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Perdagangan Jepang<sup>82</sup>

(dalam US\$ Juta)

	1950	1955	1960	1965	1970	1975	1980
<b>Singapura</b>							
Ekspor	14	59	87	124	423	1524	3911
Impor	0	16	14	33	87	399	1507
Jumlah	14	75	101	157	510	1923	5418
Perbandingan	14	43	73	91	336	1125	2404
<b>Thailand</b>							
Ekspor	43	63	118	219	449	959	1917
Impor	44	63	72	131	190	724	1119
Jumlah	87	126	190	350	639	1683	3036
Perbandingan	-1	0	46	88	259	235	798
<b>Malaysia</b>							
Ekspor	0	0	0	75	166	566	2061
Impor	0	0	0	263	419	691	3471
Jumlah	0	0	0	338	585	1257	5532
Perbandingan	0	0	0	-188	-253	-125	-1410
<b>Filipina</b>							
Ekspor	18	52	155	240	454	1026	1683
Impor	23	89	159	254	533	1121	1951
Jumlah	41	141	314	494	987	2147	3634
Perbandingan	-5	-37	-4	-14	-79	-95	-268
<b>Indonesia</b>							
Ekspor	46	65	110	205	316	1850	3458
Impor	13	81	70	149	637	3430	13167
Jumlah	59	146	180	354	953	5280	16625
Perbandingan	33	-16	40	56	-321	-1580	-9709
<b>Brunei Darussalam</b>							
Ekspor	0	0	0	0	10	34	88
Impor	0	0	0	0	1	1021	3245
Jumlah	0	0	0	0	-10	-34	-88
Perbandingan	0	0	0	0	10	-987	-3157
<b>Vietnam</b>							
Ekspor	-	-	-	-	-	-	113
Impor	-	-	-	-	-	-	49
Jumlah	-	-	-	-	-	-	162
Perbandingan	-	-	-	-	-	-	64
<b>Kamboja</b>							
Ekspor	-	-	14	13	11	0,1	25
Impor	-	-	8	8	6	0,6	0,6
Jumlah	-	-	22	21	17	0,7	25,6
Perbandingan	-	-	6	5	5	-0,5	24,4
<b>Laos</b>							
Ekspor	-	-	2	1	7	4	12
Impor	-	-	0	0	0,049	1	6
Jumlah	-	-	2	1	7,049	5	18
Perbandingan	-	-	2	1	6,951	3	6
<b>Myanmar</b>							
Ekspor	16	38	65	76	39	61	214
Impor	18	46	13	26	13	25	76
Jumlah	34	84	78	102	52	86	290
Perbandingan	-2	-8	52	50	26	36	138

<sup>82</sup> Glenn D. Hook, Julie Gilson, Christopher W. Hughes, Hugo Dobson, *Japan's International Relations: Politics, Economics and Security*, Routledge, New York, 2005, hal. 530-537

Berdasarkan tabel di atas, bahwa neraca perdagangan Jepang ke negara-negara ASEAN mengalami peningkatan dari periode setelah PD II hingga tahun 1980 khususnya antara tahun 1975- 1980 tepatnya pasca dikeluarkannya Doktrin Fukuda. Perinciannya adalah sebagai berikut. Singapura mengalami peningkatan lebih dari 2x lipat dari angka 1524 menjadi 3911, begitu juga dengan ekspor Singapura ke Jepang meningkat dari angka 399 hingga 1507. Di Thailand, ekspor Jepang meningkat dari angka 959 menjadi 1917 dan untuk ekspor Thailand ke Jepang dari angka 724 menjadi 1119. Di Malaysia perdagangan Jepang meningkat lebih dari 3x lipat dari angka 566 menjadi 2061 dan perdagangan Malaysia ke Jepang bahkan lebih tinggi peningkatannya dari angka 691 hingga menjadi 3471. Sedangkan di Filipina dari angka 1026 ke angka 1683 dan eksportnya ke Jepang dari angka 1121 mencapai angka 1951. Untuk Indonesia nilai ekspor Jepang terhitung dari angka 1850 menjadi 3458 dan untuk ekspor Indonesia ke Jepang meningkat pesat dari angka 3430 menjadi angka 13167. Sementara di Brunei Darussalam ekspor Jepang juga mengalami peningkatan dari angka 34 menjadi 88 dan impor Jepang dari Brunei juga berkembang dari angka 1021 menjadi 3245.

Bagi negara-negara yang baru bergabung di ASEAN juga mengalami peningkatan. Negara-negara tersebut adalah Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar. Untuk Vietnam sendiri, dari data tabel di atas baru melakukan kerjasama ekspor-impor dengan Jepang tahun 1980 dengan angka ekspor dari Jepang sebesar 113 dan ekspor dari Vietnam berjumlah 49. Bahkan di Kamboja angka ekspor Jepang mencapai hingga lebih dari 100x lipat dari 0,1 menjadi 25. Sangat berbeda dengan angka ekspor Kamboja ke Jepang yang tetap berada di angka 0,6. Ekspor Jepang ke Laos mengalami peningkatan dari angka 4 menjadi 12 dan impor Jepang dari Laos juga meningkat dari angka 1 menjadi 6. Kemudian negara terakhir adalah Myanmar yang angka impor dari Jepang sebesar 61 naik menjadi 214. Begitu pula angka impor dari Kamboja ke Jepang dari angka 25 menjadi 76.

## **B. Investasi Langsung**

Keadaan agak sedikit berbeda terlihat pada Investasi Luar Negeri Langsung (FDI) Jepang ke ASEAN. Menurut tabel berikut ini, tidak semua Investasi

Langsung Jepang mengalami peningkatan. Di beberapa negara ada yang mengalami peningkatan dan begitu juga sebaliknya ada beberapa negara yang mengalami penurunan. Berikut adalah tabel Investasi Langsung Jepang di ASEAN:

**Tabel 9. Investasi Langsung Jepang<sup>83</sup>**

(dalam US\$ Juta)

	1951-1964	1965	1970	1975	1980
<b>Singapura</b>					
FDI ke	15	2	9	55	140
FDI dari	0	0	0	0	0
Jumlah	15	2	9	55	140
Perbandingan	15	2	9	55	140
<b>Thailand</b>					
FDI ke	33	6	13	14	33
FDI dari	0	0	0	0	0
Jumlah	33	6	13	14	33
Perbandingan	33	6	13	14	33
<b>Malaysia</b>					
FDI ke	13	5	14	52	146
FDI dari	0	0	0	0	0
Jumlah	13	5	14	52	146
Perbandingan	13	5	14	52	146
<b>Filipina</b>					
FDI ke	24	0	29	149	78
FDI dari	0	0	0	0	0
Jumlah	24	0	29	149	78
Perbandingan	24	0	29	149	78
<b>Indonesia</b>					
FDI ke	35	16	49	585	529
FDI dari					
Jumlah	35	16	49	585	529
Perbandingan	35	16	49	585	529
<b>Brunei D.</b>					
FDI ke	1	0	0	1	0
FDI dari	0	0	0	0	0
Jumlah	1	0	0	1	0
Perbandingan	1	0	0	1	0
<b>Vietnam</b>					
FDI ke	-	-	-	-	0
FDI dari	-	-	-	-	0
Jumlah	-	-	-	-	0
Perbandingan	-	-	-	-	0
<b>Myanmar</b>					
FDI ke	0	0	0	0	0
FDI dari	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0
Perbandingan	0	0	0	0	0
<b>Kamboja</b>					
FDI ke	-	-	0	0	0
FDI dari	-	-	0	0	0
Jumlah	-	-	0	0	0
Perbandingan	-	-	0	0	0
<b>Laos</b>					
FDI ke	-	-	0	0	0
FDI dari	-	-	0	0	0
Jumlah	-	-	0	0	0
Perbandingan	-	-	0	0	0

<sup>83</sup> Glenn D. Hook, Julie Gilson, Christopher W. Hughes, Hugo Dobson, *Japan's International Relations : Politics, Economics and Security*, Routledge, New York, 2005, hal. 538-545

Dilihat dari tabel di atas terdapat 3 macam neraca hasil Investasi Langsung Jepang ke negara-negara ASEAN. Ada yang mengalami peningkatan, penurunan bahkan tetap dari periode setelah PD II hingga tahun 1980 khususnya antara tahun 1975- 1980 tepatnya pasca dikeluarkannya Doktrin Fukuda. Negara-negara yang mengalami peningkatan adalah Singapura, Thailand dan Malaysia. Investasi Jepang ke Singapura berkembang lebih dari 2x lipat dari angka 55 menjadi 140. Di Thailand, investasi Jepang juga mengalami peningkatan terhitung dari angka 14 naik ke angka 33. Begitu juga di Malaysia, investasi Jepang naik dari angka 52 ke 146.

Peningkatan di Singapura, Thailand dan Malaysia tidak terjadi di Filipina, Indonesia dan Brunei Darussalam. Investasi Jepang ke 3 negara ini mengalami penurunan. Di Filipina, nilai investasi Jepang dari angka 149 turun menjadi 78. Begitu juga di Indonesia, investasi Jepang turun dari angka 585 menjadi 529 dan di Brunei Darussalam turun dari angka 1 menjadi 0.

Sementara di Vietnam pada tahun 1980 masih berkutat di angka 0 dikarenakan pada tahun sebelumnya tidak ada investasi Jepang di negara ini. Di 3 negara Indo-China lainnya yang juga merupakan anggota ASEAN seperti Myanmar, Kamboja dan Laos, investasi Jepang tetap berada di angka 0, tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

### **C. Bidang Ekonomi, Politik dan Keamanan**

Setelah Jepang menggunakan Doktrin Fukuda sebagai pedoman Kebijakan Luar Negerinya ke negara-negara ASEAN, Ekonomi Jepang mengalami peningkatan. Hasilnya dapat kita lihat pada tabel Perdagangan dan Investasi Langsung Jepang ke ASEAN periode tahun 1975-1980. Tabel memperlihatkan bagaimana angka ekspor Jepang ke negara-negara ASEAN berkembang naik. Begitu juga dengan nilai investasi Jepang di beberapa negara ASEAN mengalami kenaikan yang cukup berarti.

Tidak hanya peningkatan, tetapi terbukanya hubungan yang selama ini tertutup terjadi. Vietnam yang sebelumnya tidak ada hubungan ekonomi baik perdagangan maupun investasi langsung dengan Jepang mulai terbuka.

Bidang Ekonomi selalu bersinergi dengan Politik. Keadaan Politik yang stabil akan mempengaruhi perekonomian. Dampaknya dapat dirasakan pada hubungan suatu negara dengan negara lain atau sekelompok negara lain. Hal ini terjadi pada Jepang dan hubungannya dengan negara-negara ASEAN. Diplomasi "*Heart to Heart*" yang dipraktekkan Jepang dapat memperbaiki hubungan Politiknya dengan ASEAN. Hubungan Politik yang pada pertengahan 1970-an sempat mengalami kemunduran.

Membaiknya hubungan Politik antara Jepang dan negara-negara ASEAN ditunjukkan dengan meningkatnya grafik kegiatan ekonomi Jepang. Investasi Langsung yang semakin banyak jumlahnya menunjukkan adanya jaminan Keamanan. Keamanan bagi Investor dan negara asal Investor. Begitu juga dengan ekspor, bertambahnya nilai ekspor Jepang memperlihatkan bahwa telah ada rasa percaya akan produk-produk Jepang dari negara-negara ASEAN.

#### **D. Bidang Sosial**

Keadaan sosial antara Jepang dan ASEAN juga menuju keadaan yang lebih baik semenjak diperkenalkannya Doktrin Fukuda. Hubungan antara Jepang dan negara-negara ASEAN berkembang menjadi lebih positif. Masyarakat negara-negara ASEAN mulai mempercayai produk-produk Jepang dengan mengimpornya dan menerima masuknya Investasi Langsung dari Jepang. Perasaan sentimen anti Jepang yang memuncak pada tahun 1974 berkurang.

#### **E. Bidang Kebudayaan**

Pengaruh Doktrin Fukuda juga dirasakan di bidang Budaya. Jepang mulai melakukan pertukaran Budaya dengan beberapa negara ASEAN. Media yang digunakan bukan hanya melalui pertunjukkan dan hiburan tetapi juga dengan melakukan pertukaran pelajar dan mahasiswa bahkan dengan menyediakan program beasiswa untuk belajar dan menempuh studi di Jepang.

Pelaksanaan hal-hal di atas dilakukan oleh Kedutaan-kedutaan Besar Jepang yang tersebar di negara-negara ASEAN. Tetapi seiring dengan waktu mulai bermunculan Badan-badan dan Organisasi yang menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut. Dari sekian nama yang menjadi pelopor dan terbesar adalah yang dikenal

dengan nama *Japan Foundation* (JF). JF tersebar di beberapa negara ASEAN dan menyediakan berbagai kegiatan di bidang Budaya dan juga Pendidikan. JF di kawasan ASEAN terdapat di Indonesia (Jakarta), Thailand (Bangkok), Filipina (Manila), Vietnam (Hanoi) dan Malaysia (Kuala Lumpur).<sup>84</sup>

#### 4.3.3. Pendekatan Teori *Soft Power* pada kasus Doktrin Fukuda

Berdasarkan pengertian Teori *Soft Power*, Doktrin Fukuda adalah kekuatan yang dimiliki oleh Jepang untuk menarik perhatian dan meyakinkan negara lainnya melalui berbagai bidang. Kekuatan yang digunakan adalah Diplomasi *Heart to Heart*, sebuah diplomasi damai dari Hati ke Hati. Diplomasi yang mencakup berbagai bidang kehidupan yang meliputi bidang Ekonomi, Perdagangan, Investasi Langsung, Politik, Sosial, Keamanan dan Kebudayaan. Sedangkan negara lainnya yang dimaksud di sini adalah negara-negara kawasan Asia Tenggara atau ASEAN.

Pelaksanaan Diplomasi *Heart to Heart* melalui Doktrin Fukuda menggunakan cara-cara damai dan halus seperti Kerjasama-kerjasama, Perjanjian-perjanjian dan Pemberian Bantuan dari negara Jepang kepada negara-negara ASEAN. Selain itu Jepang juga tidak menggunakan cara-cara militer dan kekuatan untuk mendapatkan tujuan dan apa yang mereka inginkan.

Berikut adalah ciri-ciri Teori *Soft Power* dengan memasukkan unsur-unsurnya di dalam Doktrin Fukuda :

---

<sup>84</sup> *Japan Foundation Worldwide*  
<<http://www.jpff.go.jp/world/en/asia.html#c>>

Tabel 10. Doktrin Fukuda dan *Soft Power*

<i>Soft Power</i>	Doktrin Fukuda
<p><b>Sumber</b></p> <p>Lembaga</p> <p>Kebudayaan</p> <p>Nilai Politik dan Ideologi</p> <p>Kebijakan Luar Negeri</p>	<p><i>Japan Foundation (JF)</i></p> <p>Dilakukan JF melalui pertukaran pelajar, pemutaran film setiap minggunya dan bekerjasama dengan Televisi lokal di negara-negara ASEAN untuk menyiarkan drama Jepang</p> <p>Demokrasi Liberal Jepang yang akan lebih dapat diterima oleh negara-negara ASEAN</p> <p><i>Heart to Heart Diplomacy</i> yang digunakan sebagai pedoman dalam berhubungan dengan negara-negara ASEAN</p>
<p><b>Gambaran Perilaku</b></p> <p>Perjanjian</p> <p>Kerjasama</p> <p>Pemberian Bantuan</p>	<p>Ketika Jepang berjanji kepada negara-negara ASEAN untuk menggandakan ODA dalam waktu 5 tahun ke depan pada Agustus 1977</p> <p>Dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri pada ASEAN Ministerial Meeting, ASEAN+3</p> <p>Melalui ODA, Jepang memberikan bantuan kepada negara-negara ASEAN</p>

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan kesamaan Doktrin Fukuda dan pelaksanaannya dengan Teori *Soft Power*. Dilihat dari gambaran perilaku, Jepang mengadakan beberapa perjanjian dan kerjasama seperti kerjasama di bidang Ekonomi. Sedangkan untuk pemberian bantuan Jepang membuat sebuah program bernama ODA (*Official Development Assistance*) yang bertujuan sebagai wujud kompensasi proyek perbaikan dan ganti rugi perang Jepang. Semua itu dilakukan untuk memperkuat hubungannya dengan ASEAN.

Sedangkan menurut sumbernya, salah satu Lembaga yang menjadi pendukung pelaksanaan Doktrin Fukuda dalam hal ini adalah JF (*Japan Foundation*) yang turut melakukan berbagai macam program Kebudayaan Jepang di ASEAN. Selain itu JF juga menyediakan program beasiswa untuk bersekolah di Jepang bagi para pelajar asal ASEAN dan memberikan kesempatan bagi para peneliti tentang Jepang untuk meneliti secara langsung di lokasi. Contoh lainnya juga bisa melalui pariwisata, olahraga dan teknologi tinggi.

Mengadakan pertukaran pelajar antara pelajar atau mahasiswa negara-negara ASEAN dan pelajar atau mahasiswa Jepang juga menjadi agenda JF. JF juga menyelenggarakan pertunjukkan seni dan budaya baik itu di Jepang maupun di negara-negara ASEAN. Pertunjukkan seni dan budaya Jepang diadakan di negara-negara ASEAN dan begitu juga sebaliknya, seni dan budaya negara-negara ASEAN diadakan di Jepang. Tidak hanya itu, JF juga memiliki kegiatan rutin setiap minggunya. Salah satunya adalah pemutaran film Jepang di kantor JF. Selain itu JF juga bekerjasama dengan salah satu Televisi pemerintah untuk memutar drama seri Televisi atau yang biasa disebut dengan *dorama* (ドラマ). Sebagai contoh di Indonesia, JF bekerjasama dengan TVRI menayangkan drama seri Televisi lawas berjudul OSHIN. OSHIN sendiri sudah untuk kali kedua diputar di TVRI, tepatnya beberapa bulan yang lalu.

Menurut Nilai Politik dan Ideologi negara, Jepang menjanjikan bahwa tidak akan menjadi negara adidaya militer. Artinya adalah Jepang tidak akan menggunakan kekerasan dalam menjalin hubungan luar negeri dengan negara-negara ASEAN. Selain itu Jepang sendiri telah menegaskan bahwa tidak akan memiliki kekuatan militer akibat rasa ketakutan akan perang dimasa lalu ketika

mengalami kekalahan pada PD II. Sumber terakhir berdasarkan tabel di atas adalah Kebijakan Luar Negeri. Kebijakan Luar Negeri Jepang berpedoman pada Diplomasi *Heart to Heart* yang diatur dalam Doktrin Fukuda. Melalui Doktrin Fukuda menjelaskan adanya Kebijakan Luar Negeri menjalin hubungan dengan rasa saling pengertian dan saling percaya. Selain itu Jepang juga akan mensejajarkan dirinya dengan negara-negara ASEAN sebagai mitra dalam hubungan yang positif.

Dalam bukunya *Soft Power : The Means to Success in World Politics* sumber-sumber dari *Soft Power* yang dikemukakan oleh Joseph Nye adalah Budaya, Nilai-nilai Politik dan Kebijakan Luar Negeri. Berikut adalah penjelasannya jika dilihat dari Doktrin Fukuda:

#### A. Budaya

Budaya merupakan sekumpulan nilai-nilai dan praktek yang membentuk sebuah masyarakat sosial. Budaya seringkali dibedakan menjadi 2, yaitu budaya tingkat tinggi seperti sastra, seni dan pendidikan yang biasanya dipahami dan menarik bagi kalangan atas. Budaya yang kedua adalah budaya populer yang lebih diperuntukkan bagi masyarakat luas, biasanya berupa hiburan rakyat.

Walaupun lebih memasyarakat dan dapat diterima berbagai kalangan tetapi budaya populer bukanlah termasuk *Soft Power*. Tetapi antara *Soft Power* dan budaya populer bukannya tidak terkait. Budaya populer menciptakan sesuatu yang menjadi sumber dari *Soft Power*.

Contohnya drama seri Televisi OSHIN. Pemutaran OSHIN sedikit demi sedikit mengikis sentimen negatif berupa perasaan anti Jepang di Indonesia. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Indonesia pernah dijajah selama 3,5 tahun oleh Jepang yang berakhir pada tahun 1945 bertepatan ketika Jepang mengalami kekalahan pada PD II. OSHIN sangat terkenal di Indonesia pada masa pemutaran. Tetapi diterima dan digemarinya OSHIN di Indonesia tidak membuat Jepang mudah mendapatkan hasil yang diinginkan dari Indonesia. Dengan menyaksikan drama OSHIN yang diputar di Televisi, dimaksudkan agar masyarakat Indonesia mengetahui bagaimana Jepang melalui tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Bagaimana karakter orang Jepang, bagaimana gigihnya

semangat hidup seorang OSHIN, bagaimana kehidupan sehari-hari orang Jepang pada masa perang dan sesudah perang baik itu di lingkungan tempat tinggal maupun di tempat bekerja. Di drama OSHIN juga diceritakan bagaimana penderitaan dan kesusahan yang dialami Jepang dan rakyatnya setelah kekalahan perang. Tidak hanya itu, masyarakat Indonesia juga dapat mengetahui bagaimana kebijakan dalam negeri Jepang dan aturan-aturan sosial yang berlaku di Jepang. Dengan begitu masyarakat Indonesia dapat mengetahui Budaya Jepang dan secara tidak langsung Jepang dinilai telah berhasil melakukan *Soft Power* yang bersumber dari Budaya.

#### B. Nilai-nilai Politik

Nilai-nilai Politik yang ada di dalam negeri dan luar negeri juga merupakan sumber dari *Soft Power*. Ideologi negara yang digunakan dan pelaksanaan di dalam negeri serta kepentingan suatu negara menjadi faktor penting penunjang suksesnya *Soft Power*. Begitu juga apabila menyangkut kepentingan suatu negara. Negara-negara yang berkepentingan sama tentu akan mudah untuk bekerjasama mencapai kepentingan tersebut walaupun berbeda ideologi.

Jepang yang berideologi Demokrasi Liberal tentu akan lebih mudah diterima dan menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Beberapa negara di ASEAN menjunjung tinggi Demokrasi Liberal dan salah satunya adalah Filipina. Hal yang sama juga akan terjadi apabila menyangkut kepentingan suatu negara. Negara-negara yang berkepentingan sama tentu akan mudah untuk bekerjasama mencapai kepentingan tersebut walaupun berbeda ideologi. Contohnya seperti Vietnam. Vietnam yang pemerintahannya Republik Sosialis dapat bekerjasama dengan Jepang ketika menyangkut kepentingan Ekonomi. Sebelum ada Doktrin Fukuda Vietnam tidak ada hubungan ekonomi baik perdagangan maupun investasi langsung dengan Jepang mulai membuka hubungan ekonomi.

Selain itu janji Jepang dalam salah satu butir pada Doktrin Fukuda yang menyatakan Jepang tidak akan menjadi negara adidaya militer. Hal ini penting karena akan menjadi pertimbangan penting bagi negara-negara ASEAN yang pernah merasakan pendudukan Jepang. Selain itu negara-negara ASEAN juga sempat menuduh Jepang sebagai negara yang telah melakukan penguasaan dan penjajahan terhadap Ekonomi. Bahkan negara-negara ASEAN menjuluki Jepang

dengan sebutan *economic animal*. Butir ini menjadi jaminan bahwa Jepang akan menjalin hubungan tanpa ada unsur kekuatan dan menggunakan cara yang lebih mengutamakan perdamaian.

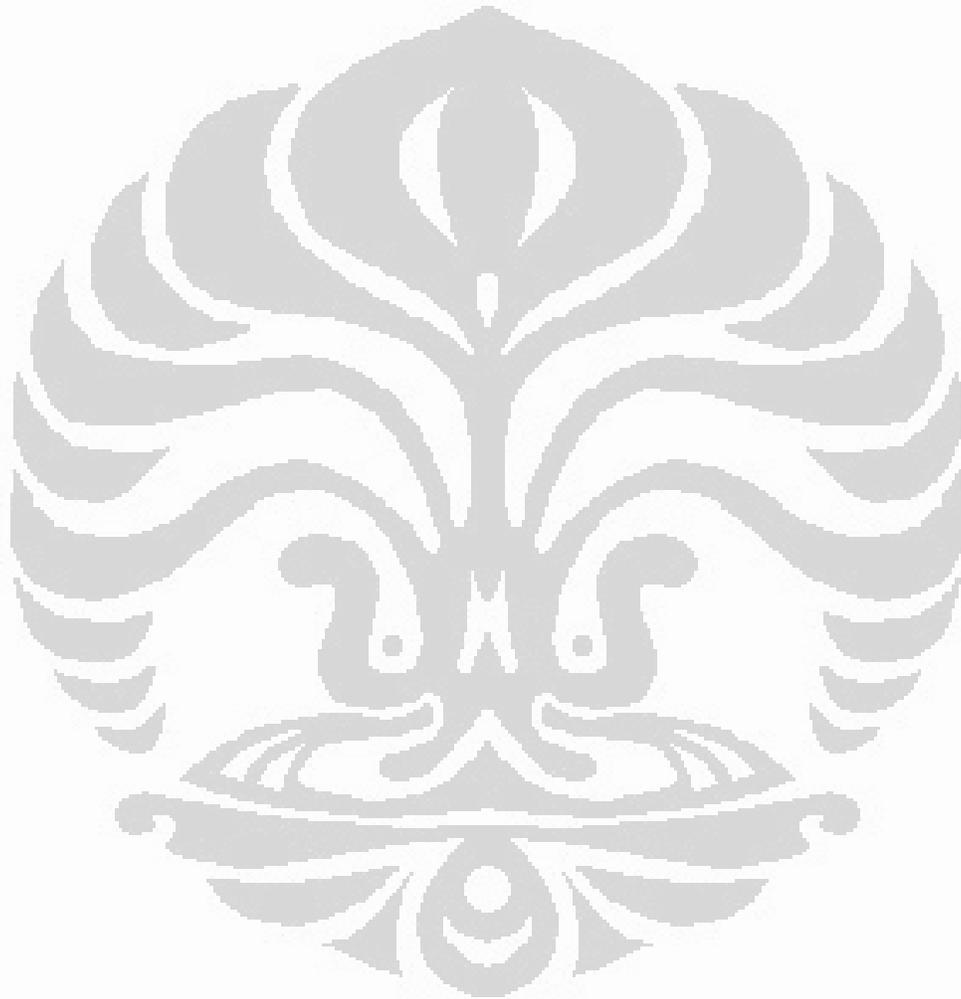
### C. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan Luar Negeri suatu negara mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap *Soft Power*. Suatu negara yang memiliki Kebijakan Luar Negeri yang populer akan sangat mudah mendapatkan hasil yang diinginkannya, tetapi apabila negara itu salah melangkah atau menciptakan Kebijakan Luar Negeri baru yang tidak populer maka tingkat kepercayaan terhadap negara tersebut akan berkurang dengan sendirinya.

Kebijakan Luar Negeri Jepang yang berpedoman pada Diplomasi dari Hati ke Hati menjadi nilai lebih dan daya tarik pada pelaksanaan Doktrin Fukuda pada masa pemerintahan PM Fukuda Takeo. Pada Doktrin Fukuda dicantumkan butir bahwa Jepang akan membangun hubungan dengan negara-negara ASEAN dengan rasa saling pengertian dan saling percaya. Hal ini membentuk sebuah keyakinan dari negara-negara ASEAN bahwa Jepang akan lebih menghormati hubungan yang sempat tidak harmonis sebelumnya. Selain itu Jepang juga menyatakan akan menjadikan negara-negara ASEAN sebagai mitra sejajar dalam hubungan yang positif. Hasil yang ditunjukkan adalah melunaknya sikap negara-negara ASEAN dengan Jepang yang kemudian berujung pada hubungan yang membaik dan meningkat antara keduanya. Negara-negara ASEAN lebih membuka diri terhadap tawaran Kebijakan Luar Negeri Jepang yang dianggap positif. Doktrin Fukuda berhasil menarik perhatian negara-negara ASEAN dan Jepang akhirnya berhasil mendapatkan Kepentingan Nasionalnya.

Di atas telah dijelaskan mengenai apa yang telah dilakukan Jepang di kawasan ASEAN merujuk pada Kebijakan Luar Negerinya dengan memasukkan unsur-unsur *Soft Power* yaitu Gambaran Perilaku dan Sumber-sumbernya. Gambaran Perilaku dapat dilihat dari hal-hal seperti Perjanjian, Kerjasama dan Pemberian Bantuan serta Sumber-sumbernya dilihat dari hal-hal seperti Lembaga, Kebudayaan, Nilai Politik dan Ideologi serta Kebijakan Luar Negeri. Berdasarkan hasil dan pengaruh yang ada pada berbagai bidang seperti Ekonomi, Politik, Keamanan, Sosial dan Budaya, didapatkan sebuah temuan penelitian bahwa

dalam pelaksanaan Doktrin Fukuda Jepang telah berhasil memperbaiki citranya yang sempat memburuk, begitu juga dengan hubungannya dengan beberapa negara ASEAN. Apa yang telah dilakukan Jepang tersebut telah sesuai dengan Teori *Soft Power* yang dikemukakan oleh Joseph S. Nye, Jr.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **1. ASEAN dan Kepentingan Jepang**

ASEAN adalah sebuah organisasi kawasan di Asia yang memiliki arti penting bagi Jepang. Terkenal akan kekayaan Sumber Daya, baik itu Sumber Daya Alamnya maupun Sumber Daya Manusianya. Sumber Daya Alamnya yang melimpah seperti Minyak di Brunei Darussalam. Jepang sangat memerlukan Minyak untuk kelangsungan hidup negaranya. Sedangkan untuk Sumber Daya Manusianya, ASEAN dengan jumlah populasi termasuk tertinggi di dunia seperti halnya Indonesia. Penduduk yang banyak adalah sebuah pasar besar bagi barang-barang produksi Jepang yang diekspor ke Asia Tenggara.

Secara wilayah Asia Tenggara juga berada pada posisi strategis. Bagi Jepang, posisi ASEAN sangat penting. Letaknya merupakan perlintasan ekspor minyak dan ekspor lainnya dari Timur Tengah dan juga negara-negara Uni Eropa. Dikarenakan kawasan Asia Tenggara menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Perairan Asia Tenggara, terutama di Selat Malaka dan Selat Lombok digunakan oleh Jepang guna mengontrol dan berkomunikasi dengan Eropa dan Timur Tengah.

Selain itu stabilitas Ekonomi dan Politik Asia Tenggara bagi Jepang sebagai bentuk keseimbangan dengan China. Hal ini karena posisi China sangat berpengaruh di Asia Tenggara yang juga diakui oleh Amerika Serikat.

#### **2. Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi Jepang Setelah Perang Dunia II sampai dengan 1970-an.**

Kebijakan Luar Negeri Jepang pasca PD II hingga 1970-an lebih banyak diwarnai oleh Kepentingan AS di Jepang dan kawasan Timur Jauh. Jepang bergantung kepada AS dengan menyerahkan masalah Keamanan dan Militer pada AS sesuai dengan Perjanjian Keamanan antara kedua negara di San Francisco. Perjanjian tersebut berisi tentang penjelasan bahwa Jepang memberikan hak

secara penuh untuk mengatur kekuatan di wilayah Jepang dan sekitarnya pada AS. Kekuatan itu meliputi wilayah daratan, udara dan laut.

Sejak itulah Jepang lebih berkonsentrasi pada Kebijakan Luar Negeri yang bertumpu pada sektor Ekonomi. Diplomasi Ekonomi pun mulai dijalankan Jepang. Perbaikan-perbaikan Ekonomi mulai dilakukan baik di dalam dan di luar negeri. Setelah itu perdagangannya meningkat, jumlah Investor dan Perusahaan-perusahaan dari Jepang yang menanam modal di luar negeri bertambah pesat. Ekonomi Jepang pun mengalami kemajuan yang luar biasa.

Kemudian pada masa pemerintahan PM Yoshida Shigeru Jepang mulai memperbaiki hubungannya dengan negara-negara bekas jajahannya melalui bidang Ekonomi. Jepang mulai mengganti penderitaan yang selama ini telah dirasakan oleh negara-negara yang pernah didudukinya pada masa perang terutama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan hal khusus tentang tentang hubungannya dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara dinyatakan dalam pidato Kebijakannya pada November 1952 di hadapan pertemuan Kabinet yang kemudian menghasilkan persetujuan terhadap Kebijakan Luar Negeri baru Jepang.

### **3. Perubahan Strategis Politik Luar Negeri Jepang di ASEAN pada akhir 1970-an yang Menghasilkan Kebijakan Luar Negeri Jepang oleh Perdana Menteri Fukuda Takeo dan Lahirnya Diplomasi Baru Jepang.**

Setelah muncul anggapan sebagai negara yang telah melakukan penjajahan ekonomi dari negara-negara Asia Tenggara yang berujung pada terjadinya Peristiwa Malari di Indonesia dan gerakan anti Jepang di Thailand dan Malaysia. Menyikapi hal ini Jepang pun melakukan berbagai cara untuk memperbaiki keadaan yang sangat tidak menguntungkan bagi Jepang dikarenakan hubungannya yang tidak begitu baik dengan negara-negara sekawasan. Dimulai dari mengganti PMnya dari Tanaka Kakuei, Miki Takeo hingga Fukuda Takeo. Akhirnya Jepang pun melakukan Perubahan Strategis Politik Luar Negeri pada masa pemerintahan PM Fukuda Takeo.

Melalui PM Fukuda Takeo, Jepang memperkenalkan Kebijakan Luar Negeri baru yang berpedoman pada Diplomasi dari Hati ke Hati. Sejak itulah pelaksanaan hubungan diplomatik dengan negara-negara Asia Tenggara menggunakan Pedoman tersebut. Diplomasi dari Hati ke Hati dirumuskan dalam sebuah Doktrin yang dinamakan Doktrin Fukuda.

Doktrin Fukuda menegaskan janji Jepang kepada negara-negara Asia Tenggara bahwa Jepang tidak akan menjadi negara adidaya militer dan adanya jaminan dari Jepang akan menjadikan negara-negara Asia Tenggara sebagai mitra sejajar dengan mendasarkan hubungan saling percaya dan saling pengertian. Doktrin Fukuda dalam pelaksanaannya memiliki beberapa pengaruh dalam bidang kehidupan. Bidang-bidang tersebut meliputi Perdagangan, Investasi Langsung, Ekonomi, Politik dan Keamanan serta Sosial dan Kebudayaan.

#### **4. Teori *Soft Power* dan Doktrin Fukuda**

Teori *Soft Power* dari Joseph S. Nye dengan konsep, gambaran perilaku dan sumber-sumbernya dapat disesuaikan dengan pelaksanaan Doktrin Fukuda berdasarkan analisis-analisis data yang ada.

##### **A. Konsep *Soft Power***

Berdasarkan konsep Teori *Soft Power*, Doktrin Fukuda adalah kekuatan yang dimiliki oleh Jepang untuk menarik perhatian dan meyakinkan negara lainnya melalui berbagai bidang. Kekuatan yang digunakan adalah Diplomasi *Heart to Heart*, sebuah diplomasi damai dari Hati ke Hati yang mencakup berbagai bidang kehidupan seperti Ekonomi, Politik, Sosial dan Kebudayaan.

##### **B. Gambaran Perilaku**

Dilihat dari gambaran perilaku, Jepang mengadakan beberapa perjanjian dan kerjasama seperti kerjasama di bidang Ekonomi. Sedangkan untuk pemberian bantuan Jepang membuat sebuah program bernama ODA (*Official Development Assistance*) yang bertujuan sebagai wujud kompensasi proyek perbaikan dan ganti rugi perang Jepang. Semua itu dilakukan untuk memperkuat hubungannya dengan ASEAN.

### C. Sumber-sumbernya

Menurut Teori *Soft Power* dari Joseph S. Nye, terdapat 3 sumber dari *Soft Power* yaitu Budaya, Nilai-nilai Politik dan Kebijakan Luar Negeri.

#### 1. Budaya

Drama seri Televisi OSHIN. Pemutaran OSHIN sedikit demi sedikit mengikis sentimen negatif berupa perasaan anti Jepang di Indonesia. Dengan menyaksikan drama OSHIN yang diputar di Televisi, dimaksudkan agar masyarakat Indonesia mengetahui bagaimana Jepang melalui tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Bagaimana karakter orang Jepang, bagaimana gigihnya semangat hidup seorang OSHIN, bagaimana kehidupan sehari-hari orang Jepang pada masa perang dan se usai perang baik itu di lingkungan tempat tinggal maupun di tempat bekerja.

#### 2. Nilai-nilai Politik

Jepang yang berideologi Demokrasi Liberal tentu akan lebih mudah diterima dan menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Beberapa negara di ASEAN menjunjung tinggi Demokrasi Liberal dan salah satunya adalah Filipina. Hal yang sama juga akan terjadi apabila menyangkut kepentingan suatu negara. Negara-negara yang berkepentingan sama tentu akan mudah untuk bekerjasama mencapai kepentingan tersebut walaupun berbeda ideologi. Contohnya seperti Vietnam. Vietnam yang pemerintahannya Republik Sosialis dapat bekerjasama dengan Jepang ketika menyangkut kepentingan Ekonomi.

#### 3. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan Luar Negeri Jepang yang berpedoman pada Diplomasi dari Hati ke Hati menjadi nilai lebih dan daya tarik pada pelaksanaan Doktrin Fukuda pada masa pemerintahan PM Fukuda Takeo. Pada Doktrin Fukuda dicantumkan butir bahwa Jepang akan membangun hubungan dengan negara-negara ASEAN dengan rasa saling pengertian dan saling percaya. Hal ini membentuk sebuah keyakinan dari negara-negara ASEAN bahwa Jepang akan lebih menghormati hubungan yang sempat tidak harmonis sebelumnya.

Dari penjelasan singkat di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu :

1. ASEAN adalah organisasi kawasan yang penting bagi Jepang.
2. Politik Luar Negeri Jepang pasca Perang Dunia II hingga 1970-an memfokuskan diri pada bidang Ekonomi.
3. Doktrin Fukuda telah berhasil dilakukan oleh Jepang sebagai bentuk Perubahan Strategis Politik Luar Negerinya di ASEAN pada akhir 1970-an.
4. Kebijakan Doktrin Fukuda sesuai dengan Teori *Soft Power*.

Jadi implikasi tesis saya adalah bahwa Kebijakan Perdana Menteri Fukuda Takeo terhadap ASEAN, Doktrin Fukuda, dilakukan sesuai dengan gambaran perilaku (Perjanjian, Kerjasama, pemberian bantuan) dan sumber dari *Soft Power* (Lembaga, Kebudayaan, Nilai Politik dan Ideologi, Kebijakan Luar Negeri). Sedangkan bagi studi Kajian Wilayah Jepang, penelitian ini memberikan pengetahuan, seperti : 1. Mengetahui bentuk kerjasama-kerjasama Jepang dengan ASEAN. 2. Memberikan pengetahuan tentang politik luar negeri Jepang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Allinson, Gary D (2004). *Japan's Postwar History*. New York: Cornell University Press.
- ASEAN-Japan Cooperation: A Foundation for East Asian Community* (2003). Tokyo: Japan Center for International Exchange.
- Cipto, Bambang (2003). *Politik dan Pemerintahan Amerika*. Yogyakarta: Penerbit Lingkaran.
- Dower, John W (1993). *Japan In War & Peace : Selected Essays*. New York: The New Press.
- Drifte, Reinhard (1990). *Japan's Foreign Policy*. London: Routledge.
- Hadi, Syamsul (2005). *Strategi Pembangunan Mahathir dan Soeharto Politik Industrialisasi dan Modal Jepang di Malaysia dan Indonesia*. Jakarta: Pelangi Cendekia dari Yayasan Pelangi dibantu Japan Foundation.
- Hendry, Joy (1995). *Understanding Japanese Society*. New York: Routledge.
- Hermawan, Yulius (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hill, Christopher (2003). *The Changing Politic of Foreign Policy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Hook, Glenn D. Gilson, Julie. Hughes, Christopher W & Dobson, Hugo (2005). *Japan's International Relations : Politics, economics and security*. New York: Routledge.
- Irsan, Abdul (2007). *Budaya & Perilaku Politik Jepang di Asia*. Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu.
- Isaak, Robert A (1995). *Ekonomi Politik Internasional*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- J.H, A. Irawan (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kan, Hideki (2007). *Bahan Kuliah: Postwar Japanese Diplomacy: Agenda And Problems*. Depok.

- Losco, Joseph & Williams, Leonard (2005). *Political Theory: Kajian Klasik dan Kontemporer: Pemikiran Thucydides – Machiavelli* Volume.1 (Haris Munandar, Penerjemah). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Losco, Joseph & Williams, Leonard (2005). *Political Theory: Kajian Klasik dan Kontemporer: Pemikiran Thucydides – Machiavelli* Volume.2 (Haris Munandar, Penerjemah). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Maswood, S Javed (2001). *Japan and East Asian Regionalism*. New York: Routledge.
- Murakami, Hyoe & Seidensticker, Edward G (1977). *Guides to Japanese Culture*. Tokyo: The Japan Culture Institute.
- Nye Jr, Joseph S (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- Okita, Saburo (1992). *Postwar Reconstruction of The Japanese Economy*. Tokyo: University of Tokyo Press.
- Ritzer, George & Goodman, Douglas (2004). *Teori Sosiologi Modern*, Edisi ke-6. Jakarta: Kencana.
- Roy, S L (1991). *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudo, Sueo (1992). *The Fukuda Doctrine and ASEAN: New Dimensions in Japanese Foreign Policy*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Surajaya M.A, Prof. Dr. I Ketut (2001). *Bahan Kuliah: Pengantar Sejarah Jepang 1*. Jakarta.
- Surajaya M.A, Prof. Dr. I Ketut (2001). *Bahan Kuliah: Pengantar Sejarah Jepang 2*. Jakarta.
- Suryana, Agus (2005). *Profil Negara: Negara Macan Asia, NAFTA & Uni Eropa*. Jakarta: Harapan Baru Raya.
- Syafie M.Si, Drs. H. Inu Kencana & Azikin M.Si, Drs. Andi (2007). *Perbandingan Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Viotu, Paul R & Kauppi, Mark V (1993). *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Vogel, Steven K (2002). *U.S. Japan Relations in A Changing World*. Washington DC: The Brookings Institution.
- Warsito, Tulus & Kartikasari, Wahyuni (2007). *Diplomasi Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Yamashita, Shoichi (1991). *Transfer of Technology and Management to The ASEAN Countries*. Tokyo: University of Tokyo Press.

- Yoichi, Masuzoe (2000). *Years of Trial : Japan In The 1990s*. Tokyo: Japan Echo Inc.
- Yudoyoko, Fajar Iriani Sophiaan. Honna, Jun & Kosandi, Meidi (2006). *Dinamika Hubungan Sipil Militer dalam Sistem Politik Jepang*. Depok: Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia.

#### **PUBLIKASI ELEKTRONIK :**

Adam, Asvi Warman (16 Januari 2003). *Malari 1974 dan Sisi Gelap Sejarah*.  
<<http://www.kompas.com>>

*ASEAN Hymn*.  
<<http://www.aseansec.org/ASEANHymn.htm>>

*ASEAN Map*.  
<<http://www.aseansec.org/Images/map-all.gif>>

*ASEAN Name and Logo*.  
<<http://www.asean.org/logo/nlogo.gif>>

*ASEAN Name and Logo*.  
<<http://www.aseansec.org/7095.htm>>

*Association South East Asia Nations*.  
<<http://www.youtube.com/watch?v=ZfHJdhVdIIQ>>

*Bangkok Declaration (1967)*.  
<<http://www.asean.org/1212.htm>>

*Fukuda Takeo*.  
<<http://www.kantei.go.jp/foreign/cabinet/images/souri67.jpg>>

*Japan Foundation Worldwide*.  
<<http://www.jpf.go.jp/world/en/asia.html#c>>

*Joseph S. Nye Jr.*  
<<http://www.princeton.edu.jpeg>>

*Map of Japan*.  
<<http://www.map-of-japan.org/map-of-japan.gif>>

*Member Countries.*

<[http://www.asean.org/member\\_countries](http://www.asean.org/member_countries)>

Murray, Sayle (08 Juli 1995), *Obituary: Takeo Fukuda.*

<<http://www.independent.co.uk/news/people/obituary-takeo-fukuda-1590409.html>>

Nye, Jr, S, Joseph (10 Januari 2003). *Propaganda Isn't The Way : Soft Power, The International Herald Tribune.*

<[http://www.ksg.harvard.edu/news/opeds/2003/nye\\_soft\\_power\\_iht\\_011003.htm](http://www.ksg.harvard.edu/news/opeds/2003/nye_soft_power_iht_011003.htm)>

*Overview: Association South East Asia Nations.*

<<http://www.asean.org/64.htm>>

*Prime Minister of Japan and His Cabinet.*

<<http://www.kantei.go.jp>>

Rutledge, Ann (22 April 2004). *Soft Power : The Means to Success in World Politics.* <[http://www.japansociety.org/corporate/event\\_corp\\_note.cfm](http://www.japansociety.org/corporate/event_corp_note.cfm)>

Sahasrad, Herdi (28 September 2007). *PM Fukuda, Asia Tenggara dan Doktrin Fukuda.*

<<http://www.bisnis.com>>

*Speech By Prime Minister Takeo Fukuda at Manila (Fukuda Doctrine Speech)*

<[http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/world\\_japan/documents/texts/docs/19770818.SIE.html](http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/world_japan/documents/texts/docs/19770818.SIE.html)>

Widyahartono, Bob (16 September 2007). *Telaah – Sejarah Pendekatan "Kokusaiika" Sejak Doktrin Fukuda 1977, ANTARA NEWS.*

<<http://www.antara.com>>

**SKRIPSI/TESIS :**

Gunawan, Indra. *Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap Asia Tenggara pada Era Fukuda (1976-1978) : kasus Hubungan Antar Birokrat dan Politisi dalam Proses Perumusannya*, Depok: FISIP UI.

Kusumaningtyas, Wida (2008). *Budaya Pop sebagai Sumber Daya Soft Power Amerika Serikat*, Surabaya: FISIP UNAIR.



*Lampiran-lampiran*

## **Pidato Perdana Menteri Fukuda Takeo**

**mengenai Doktrin Fukuda di Manila, 18 Agustus 1977**

President Marcos, Madam Imelda Romualdez Marcos, Distinguished Guests, Ladies and Gentleman:

1. My journey through Southeast Asia, which began in Kuala Lumpur with my meetings with the leaders of ASEAN, is now approaching its end. I am delighted, as a kind of finishing touch to his journey, to be able to share my ideas with you, here in the Republic of the Philippines, our nearest neighbor, in the distinguished presence of one of Asia's most eminent leaders, and my close friend, president Marcos.

2. Let me begin with one strong impression I gained from my tour.

It was the spectacular and rich diversity of the area I have just visited, the diversity in ethnic composition, language and religion, in the cultural impact of distinct histories, and in economic structures. Southeast Asia is by no means a homogeneous or uniform part of the world. It is no wonder that some have been skeptical of the prospects for intra-regional cooperation in this area.

Yet, the Association of Southeast Asian Nations, which has just celebrated its tenth anniversary, is now in the process of firmly establishing itself as a self-reliant organization for regional cooperation in the area. The first summit conference in Bali was a milestone in progress toward solidarity. And the success of the summit conference which has just ended confirms the belief that the determination of the ASEAN members to strengthen their solidarity is now irreversible.

ASEAN is, indeed, a historic and successful attempt to seek and create a regional identity of this area through the strengthening of solidarity, while affirming the rich diversity of its membership, and respecting the proud nationalism of each member country. I saw, and was impressed by one expression of these creative efforts, the ardent dedication to solidarity of the ASEAN leaders whom I had the pleasure of meeting in Kuala Lumpur.

The solidarity of ASEAN strengthened by the success of cooperative undertakings, in turn, opens up new opportunities for useful collaboration, thus, further strengthening solidarity. This dynamic and self-reinforcing process will, I believe, characterize the future course of ASEAN. Progress toward regional solidarity may at times be slow, in comparison with more homogeneous regional groupings, such as Western Europe, and there may be occasional pauses.

But let me here offer a pledge to the leaders and peoples of ASEAN. My pledge is that the government and people of Japan will never be skeptical bystanders in regard to ASEAN's efforts to achieve increased resilience and greater regional

solidarity; but will always be with you as good partners, walking hand in hand with ASEAN.

The ASEAN heads of government, in our recent meetings, called Japan "an especially close friend" of ASEAN. A true friend is one who offers his hand in understanding and cooperation, not only in fair weather, but in adverse circumstances as well. I know Japan will be such a friend to ASEAN.

4. Ladies and gentlemen,

I should now like to say a few words about the basic position and posture of today's Japan - the world role we see for ourselves, and, especially, what this means for our relations with our Asian neighbors and friends.

During the thirty-odd years since World War II, the Japanese-people have worked hard at building a free and democratic society. In the course of those decades, this open system has made Japan a world economic power of 110 million people, with a gross national product of half a trillion dollars and the will - as well as the capacity - to participate constructively in world economic growth and development.

Throughout the world's history, great economic powers have always been great military powers as well. Japan, however, has set for herself a new ideal, unprecedented in history, of relying for her safety and survival on the justice and good faith of nations. We have chosen not to take the path to great military power. Although we possess the economic and technological capability needed to produce nuclear arms, we have firmly rejected the acquisition of such weapons.

This challenging experiment, without parallel in history, I am, however, persuaded there can be no other proper course for Japan. My country, densely populated and with few nature resources, depends for its survival on free intercourse and cooperation with all countries. Moreover, I believe the path Japan has chosen also serves the best interests of Asia and, in the final analysis, of the world as a whole. A Japan which does not pose any threat to its neighbor countries, either in a military way or in any other way whatever, can only be viewed as a stabilizing force in the world. Devoting its energies exclusively to peaceful and constructive purposes at home and abroad. Thus can Japan best contribute to world peace, stability and development.

5. I have often said that we live in an age which compels greater cooperation and solidarity among men. No human being can live in isolation. Society exists to serve each individual in the development of his or her potentiality, the fruits of which are shared and complement each other. As society is improved, each individual finds greater opportunities for total fulfillment.

So also in our increasingly interdependent world community, no nation can any longer go it alone. All nations must learn to help and to complement each other,

sharing responsibilities in the world community. And as the world community is improved, each nation will find greater opportunities for fulfilling its people's aspirations.

6. This principle has special relevance to relations between Japan and the nations of Southeast Asia. It is not enough for our relationship to be based solely on mutual material and economic benefit. Our material and economic relations should be animated by heartfelt commitments to assisting and complementing each other as fellow Asians.

This is the message I have carried everywhere on this tour, speaking repeatedly of the need to communicate with each other with our hearts as well as our heads, the need in other words for what I call "heart-to-heart" understanding among the peoples of Japan and Southeast Asia.

You, fellow Asians, will understand what I mean. For it is in our Asian tradition, and it is in our Asian hearts, always to seek beyond physical satisfaction for the richness of spiritual fulfillment.

7. There is no need for me to stress the important role cultural exchange plays in deepening mutual understanding and appreciation, heart-to-heart and person-to-person, between the peoples of Southeast Asia and Japan.

Today, between Japan and Southeast Asia, there are active programs of exchange in scientific, artistic, sports and other fields. This is no one-way street, serving only to introduce Japan's culture to our neighbors. We are also introducing the ancient and glorious cultures of Southeast Asia to the Japanese people. It goes without saying that the promotion of these two-way cultural exchanges between Japan and the ASEAN nations should be further intensified. It should also be noted that as the sense of solidarity rises among the countries in the region. The increasing importance is being felt of the need to promote exchanges among the ASEAN nations in the fields of culture, science, and, in particular, regional studies. It is from this point of view that I have expressed Japan's readiness to extend our full cooperation in this regard in response to the concrete formulation by ASEAN of a workable scheme for such enhanced intra-regional exchanges. This reflects the Japanese people's appreciation of the desire of the peoples of the ASEAN nations to enhance mutual understanding among themselves. I was gratified that all the leaders of the ASEAN nations expressed their enthusiasm for this proposal of mine as timely in my meeting with them, and I feel certain that we will before long see this idea translated into a concrete action by ASEAN.

8. Furthermore, when I responded positively to the request for cooperation to the value of one billion dollars for ASEAN to industrial projects. It was because I believed it important respond with "heart-to-heart" understanding to the hearts of the peoples of the ASEAN nations, who fervently desire the strengthening of the regional solidarity.

Japan has already announced a policy of more than doubling its Official Development Assistance within the next five years. We anticipate that an important part of this assistance will continue to be for industrial projects, or for infrastructure improvement which will facilitate industrialization in Southeast Asia. At the same time, we shall intensify our cooperation in areas close to the people's welfare - agriculture, health and education.

9. As may be noted from the fact that half of Japan's Official Development Assistance is now directed toward the ASEAN nations and Burma, our economic relations with all, six nations are already close. Following up the results of the summit meeting in Kuala Lumpur, and the meetings with the individual leaders of these countries in their respective capitals, we shall continue to have close consultations with these countries to further explore ways of strengthening our ties. Needless to say, as a world industrial power, Japan has inescapable responsibilities to the world economy as a whole, in both trade and aid. A world divided into exclusive economic blocs would be something suicidal for all the nations on earth. Such a world would certainly go against the interests of the ASEAN nations, whose future lies in expanding export markets throughout the world. In seeking specially close trade and economic ties with the ASEAN nations, we should of course act with a full understanding of each other's long-term and wider interests and respective positions in the world economy. This is very important when we aim at the building of an enduring cooperative relationship between Japan and the ASEAN countries.

10. Finally, we all recognize that the future stability and prosperity of the ASEAN area can only be assured within a framework of peaceful progress throughout Southeast Asia as a whole. Now that decades of war and destruction have finally come to an end, we have a chance to work for enduring peace and stability in the whole region. Let me pay tribute here to the ASEAN countries for having expressed, in the joint communique of the ASEAN summit, their desire to develop peaceful and mutually beneficial relations with the nations of Indochina, enunciating their policy that "further efforts should be made to enlarge the areas of understanding and cooperation with those countries on the basis of mutuality of interests." I believe that these patient efforts will eventually expand the scope of mutual understanding and trust throughout the breadth of Southeast Asia. Towards this same objective, Japan will also seek to place relations with the nations of Indochina on a solid foundation of mutual understanding.

11. Ladies and gentleman,

I have expressed all of these ideas, in my very productive meetings with leaders of the ASEAN nations and Burma during the last fortnight, and have outlined Japan's position with regard to Southeast Asia.

I consider it a great fruit of my journey this time that such position of Japan as I have explained has been met by full appreciation and concurrence by all the leaders of the nations that I visited. I may summarize this position as follows:

first, Japan, a nation committed to peace, rejects the role of a military power, and on that basis is resolved to contribute to the peace and prosperity of Southeast Asia, and of the world community,

second, Japan, as a true friend of the countries of Southeast Asia, will do its best for consolidating the relationship of mutual confidence and trust based on "heart-to-heart" understanding with these countries, in wide-ranging fields covering not only political and economic areas but also social and cultural areas,

third, Japan will be an equal partner of ASEAN and its member countries, and cooperate positively with them in their own efforts to strengthen their solidarity and resilience, together with other nations of Indochina, and will thus contribute to the building of peace and prosperity throughout Southeast Asia.

I intend to implement vigorously these three pillars of Japan's policy with regard to Southeast Asia. It is my hope that we may build on such foundations a strong framework of cooperation, animated by mutual understanding, confidence and trust, throughout Southeast Asia. By joining together in this shared endeavor, we will be making the greatest contribution in our power to peace and prosperity in Asia and to the well-being of all the peoples of the world.

12. Mr. President, citizens of the republic of the Philippines,

My first act on arriving in Manila yesterday was to pay tribute to Dr. Jose Rizal, the leader of the movement for Philippine independence by laying a wreath at his monument. It was, indeed, the Philippine people who first lit the fire of the independence movement in Southeast Asia. Today, as new horizons are opening up in international relations, it is only natural that the Philippines, under your excellency's able leadership, should be taking a positive initiative as it is in expanding regional cooperation under ASEAN and in its international efforts to solve North-South problems.

We are now opening a new page in the history of the relations between Japan and the nations of Southeast Asia. We are reaching together for higher levels of mutual trust, based on "heart-to-heart" understanding between us. I earnestly hope that you, Mr. President, and the people of the Philippines will be willing to play a leading role on this new frontier as well.

Thank you. Salamat po.

("The World and Japan" Database Project  
Database of Japanese Politics and International Relations  
Institute of Oriental Culture, University of Tokyo)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Speech By Prime Minister Takeo Fukuda at Manila (Fukuda Doctrine Speech)*  
<[http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/world\\_japan/documents/texts/docs/19770818.SIE.html](http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/world_japan/documents/texts/docs/19770818.SIE.html)>

## **The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration)**

Bangkok, 8 August 1967

The Presidium Minister for Political Affairs/ Minister for Foreign Affairs of Indonesia, the Deputy Prime Minister of Malaysia, the Secretary of Foreign Affairs of the Philippines, the Minister for Foreign Affairs of Singapore and the Minister of Foreign Affairs of Thailand:

**MINDFUL** of the existence of mutual interests and common problems among countries of South-East Asia and convinced of the need to strengthen further the existing bonds of regional solidarity and cooperation;

**DESIRING** to establish a firm foundation for common action to promote regional cooperation in South-East Asia in the spirit of equality and partnership and thereby contribute towards peace, progress and prosperity in the region;

**CONSCIOUS** that in an increasingly interdependent world, the cherished ideals of peace, freedom, social justice and economic well-being are best attained by fostering good understanding, good neighbourliness and meaningful cooperation among the countries of the region already bound together by ties of history and culture;

**CONSIDERING** that the countries of SouthEast Asia share a primary responsibility for strengthening the economic and social stability of the region and ensuring their peacefull and progressive national development, and that they are determined to ensure their stability and security from external interference in any form or manifestation in order to preserve their national identities in accordance with the ideals and aspirations of their peoples;

**AFFIRMING** that all foreign bases are temporary and remain only with the expressed concurrence of the countries concerned and are not intended to be used directly or indirectly to subvert the national independence and freedom of States in the area or prejudice the orderly processes of their national development;

### **DO HEREBY DECLARE:**

**FIRST**, the establishment of an Association for Regional Cooperation among the countries of South-East Asia to be known as the Association of South-East Asian Nations (ASEAN).

**SECOND**, that the aims and purposes of the Association shall be:

1. To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavours in the spirit of

equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of South-East Asian Nations;

2. To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter;
3. To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, cultural, technical, scientific and administrative fields;
4. To provide assistance to each other in the form of training and research facilities in the educational, professional, technical and administrative spheres;
5. To collaborate more effectively for the greater utilization of their agriculture and industries, the expansion of their trade, including the study of the problems of international commodity trade, the improvement of their transportation and communications facilities and the raising of the living standards of their peoples;
6. To promote South-East Asian studies;
7. To maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organizations with similar aims and purposes, and explore all avenues for even closer cooperation among themselves.

**THIRD**, that to carry out these aims and purposes, the following machinery shall be established:

- (a) Annual Meeting of Foreign Ministers, which shall be by rotation and referred to as ASEAN Ministerial Meeting. Special Meetings of Foreign Ministers may be convened as required.
- (b) A Standing committee, under the chairmanship of the Foreign Minister of the host country or his representative and having as its members the accredited Ambassadors of the other member countries, to carry on the work of the Association in between Meetings of Foreign Ministers.
- (c) Ad-Hoc Committees and Permanent Committees of specialists and officials on specific subjects.
- (d) A National Secretariat in each member country to carry out the work of the Association on behalf of that country and to service the Annual or Special Meetings of Foreign Ministers, the Standing Committee and such other committees as may hereafter be established.

**FOURTH**, that the Association is open for participation to all States in the South-East Asian Region subscribing to the aforementioned aims, principles and purposes.

**FIFTH**, that the Association represents the collective will of the nations of South-East Asia to bind themselves together in friendship and cooperation and, through joint efforts and sacrifices, secure for their peoples and for posterity the blessings of peace, freedom and prosperity.

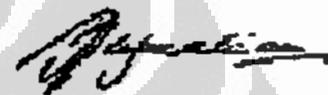
**DONE** in Bangkok on the Eighth Day of August in the Year One Thousand Nine Hundred and Sixty-Seven.

**For the Republic of Indonesia :**



**ADAM MALIK**  
Presidium Minister for Political  
Minister for Foreign Affairs

**For the Republic of Singapore :**



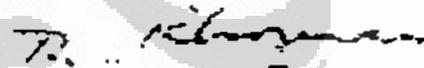
**S. RAJARATNAM**  
Minister of Foreign Affairs

**For Malaysia :**



**TUN ABDUL RAZAK**  
Deputy Prime Minister,  
Minister of Defence and  
Minister of National Development

**For the Kingdom of Thailand :**



**THANAT KHOMAN**  
Minister of Foreign Affairs

**For the Republic of the Philippines :**



**NARCISO RAMOS**  
Secretary of Foreign Affairs

<sup>2</sup> *Bangkok Declaration (1967).*  
<<http://www.asean.org/1212.htm>>